



ISBN. 979-474-252-X

31542.9606

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT DKI JAKARTA 1995

KANTOR STATISTIK *BPS* PROPINSI DKI JAKARTA



PERPUSTAKAAN
Badan Pusat Statistik Propinsi
DKI JAKARTA

ISBN. 979-474-252-X
31542.9606

MILIK

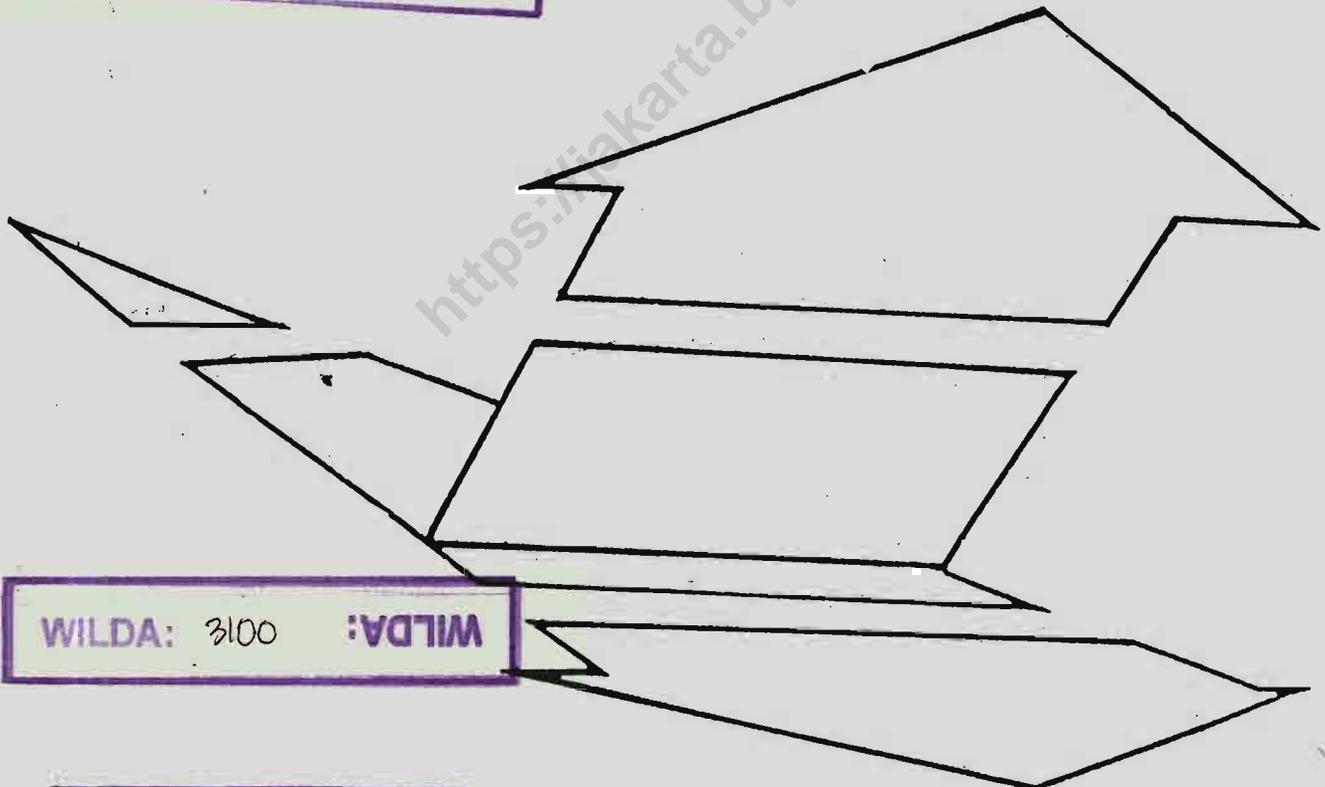
PERPUSTAKAAN
BPS PROVINSI
DKI JAKARTA

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT DKI JAKARTA

1995

NO. PUSTAKA :	10.0396.0052
M F N :	326.
MILIK :	BPS PROVINSI DKI JAKARTA

<https://jakarta.bps.go.id>



WILDA: 0018 :WILDA

ARSIP

KATA PENGANTAR

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat DKI Jakarta Tahun 1995 merupakan publikasi yang disusun oleh Kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta bekerja sama dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, yang menyajikan data mengenai kesejahteraan rakyat DKI Jakarta.

Analisis dimulai dari kondisi kependudukan seperti komposisi penduduk, status perkawinan, kelahiran, kematian serta keluarga berencana, dan diakhiri dengan indikator lain berupa indikator perjalanan wisata, akses masyarakat terhadap media massa dan lingkungan.

Disadari bahwa publikasi ini dapat terwujud berkat kerja sama dengan berbagai instansi. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang telah memberikan masukan-masukan sehingga publikasi ini dapat berhasil diwujudkan.

Kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak untuk perbaikan publikasi ini di masa yang akan datang. Akhirnya kami berharap agar publikasi ini bermanfaat.

Jakarta, Maret 1996.

**KANTOR STATISTIK PROPINSI
DKI JAKARTA
Kepala,**



**ABDUL KADIR HASIBUAN, M.Sc.
NIP. 340000764**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I. PENDAHULUAN	1 - 4
1.1. Latar Belakang dan Ruang Lingkup.	1
1.2. Tujuan Penulisan.	2
1.3. Jenis dan Sumber Data.	2
1.4. Sistematika.	4
BAB II. KEPENDUDUKAN	5 - 16
2.1. Pertumbuhan dan Komposisi Penduduk.	5
2.2. Status dan Usia Perkawinan.	8
2.3. Kelahiran dan Kematian.	9
2.4. Pemakaian Alat/Cara Keluarga Berencana.	11
BAB III. PENDIDIKAN	17 - 27
3.1. Buta Huruf.	17
3.2. Partisipasi Sekolah.	19
3.3. Tingkat Pendidikan.	22
3.4. Kemudahan Rumah tangga Memasukkan Anak Sekolah.	23
BAB IV. KETENAGAKERJAAN	28 - 36
4.1. Penduduk Menurut Jenis Kegiatan.	29
4.2. Penduduk Bekerja.	30
4.3. Pengangguran.	32
BAB V. KESEHATAN	37 - 46
5.1. Angka Kematian Bayi dan Balita serta Angka Harapan Hidup.	37
5.2. Pemberian Imunisasi Ibu Hamil dan Anak Balita.	38
5.3. Gizi Balita.	39
5.4. Pemberian Air Susu Ibu (ASI).	39
5.5. Penolong Kelahiran.	40

BAB VI. PERUMAHAN	47 - 59
6.1. Luas Lantai	47
6.2. Sumber dan Penggunaan Air	49
6.3. Tempat Buang Air Besar	52
BAB VII. PENDAPATAN DAN PENGELUARAN RUMAHTANGGA	60 - 72
7.1. Distribusi Pendapatan dan Gini Ratio	60
7.2. Pengeluaran per Kapita Menurut Jenis Pengeluaran	62
7.3. Konsumsi Kalori dan Protein	64
7.4. Perkembangan Kesejahteraan Konsumsi Makanan	66
BAB VIII. INDIKATOR LAINNYA	73 - 90
8.1. Perjalanan Wisata	73
8.2. Akses Terhadap Media Massa	74
8.3. Kriminalitas	75
8.4. Aspek Lainnya	77
BAB IX. KESIMPULAN DAN SARAN	91 - 94
9.1. Kesimpulan	91
9.2. S a r a n	93

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Propinsi dan Pertumbuhan Penduduk menurut Kota madya di DKI Jakarta Tahun 1980, 1990 dan 1995.....	12
Tabel 2.2. Kepadatan Penduduk menurut Kotamadya di DKI Jakarta, Tahun 1980, 1990 dan 1995.....	12
Tabel 2.3. Distribusi persentase penduduk menurut golongan umur dan Jenis Kelamin di DKI Jakarta, Tahun 1980, 1990 dan 1995.....	13
Tabel 2.4. Rasio jenis kelamin menurut golongan umur di DKI Jakarta, Tahun 1990, 1993 dan 1995.....	14
Tabel 2.5. Distribusi persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut Status perkawinan dan Jenis Kelamin di DKI Jakarta, Tahun 1990, 1993 dan 1995.....	14
Tabel 2.6. Distribusi persentase penduduk wanita pernah kawin menurut usia perkawinan di DKI Jakarta, Tahun 1992 dan 1995.....	15
Tabel 2.7. Rata-rata anak yang pernah dilahirkan hidup per 10 wanita pernah kawin berumur 15 - 49 tahun di DKI Jakarta, Tahun 1980 - 1995.....	15
Tabel 2.8. Angka fertilitas total, Angka Kelahiran Kasar, Angka Kematian Kasar dan Angka Harapan Hidup di DKI Jakarta, Tahun 1990 - 1995.....	16
Tabel 2.9. Distribusi persentase wanita kawin usia 15 - 49 tahun menurut pemakaian alat KB di DKI Jakarta, Tahun 1992 dan 1995.....	16
Tabel 3.1. Tingkat buta huruf menurut golongan umur dan jenis kelamin di DKI Jakarta, Tahun 1990 dan 1995.....	24

Tabel 3.2.	Tingkat buta huruf penduduk usia 10 tahun ke atas menurut Kotamadya dan Jenis Kelamin di DKI Jakarta, Tahun 1990 dan 1995.....	25
Tabel 3.3.	Tingkat partisipasi sekolah menurut usia Sekolah Dasar, SMTP, SMTA dan Jenis Kelamin di DKI Jakarta, Tahun 1990 dan 1995.....	25
Tabel 3.4.	Tingkat partisipasi sekolah menurut usia Sekolah Dasar, SMTP, SMTA dan Jenis Kelamin dan Kotamadya di DKI Jakarta, Tahun 1995.....	26
Tabel 3.5.	Angka partisipasi Sekolah Dasar (GER) Sekolah Dasar, SMTP, SMTA dan Jenis Kelamin di DKI Jakarta, Tahun 1990 dan 1995.....	26
Tabel 3.6.	Distribusi persentase penduduk 10 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi dan jenis kelamin di DKI Jakarta, Tahun 1990 dan 1995.....	27
Tabel 3.7.	Distribusi persentase rumahtangga menurut perkembangan kemudahan memasukkan anak SD, SMTP dan SMTA selama tiga tahun terakhir di DKI Jakarta, Tahun 1994.....	28
Tabel 4.1.	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut jenis kegiatan di DKI Jakarta, Tahun 1990, 1993 dan 1995.....	33
Tabel 4.2.	Pertumbuhan angka kerja dan penduduk bekerja di DKI Jakarta, Tahun 1990 - 1995.....	33
Tabel 4.3.	Persentase penduduk bekerja menurut jenis pekerjaan di DKI Jakarta, Tahun 1990 - 1995.....	34
Tabel 4.4.	Persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan di DKI Jakarta, Tahun 1990 - 1995.....	34
Tabel 4.5.	Persentase Penduduk bekerja menurut pendidikan di DKI Jakarta, Tahun 1990 - 1995.....	35

Tabel 4.6.	Angka pengangguran menurut jenis kelamin di DKI Jakarta, Tahun 1990 - 1995.....	35
Tabel 4.7.	Persentase angka pengangguran menurut golongan umur di DKI Jakarta, Tahun 1990, 1993 dan 1995.....	36
Tabel 5.1.	Angka kematian Bayi dan angka kematian Balita di DKI Jakarta, Tahun 1980 - 1995.....	42
Tabel 5.2.	Distribusi persentase kelahiran selama lima tahun sebelum survei yang ibu mereka mendapat suntikan tetanus toxoig (TT) dan persentase dari ibu yang ketika hamil mendapat kartu imunisasi (KMS) menurut kotamadya di DKI Jakarta, Tahun 1994.....	43
Tabel 5.3.	Distribusi persentase Balita yang pernah/tidak pernah mendapat imunisasi menurut kotamadya di DKI Jakarta, Tahun 1993 - 1995.....	44
Tabel 5.4.	Distribusi persentase Balita menurut Status Gizi di DKI Jakarta, Tahun 1985 - 1993.....	45
Tabel 5.5.	Persentase Balita menurut lama disusui di DKI Jakarta, Tahun 1992 - 1995.....	45
Tabel 5.6.	Rata-rata lama pemberian ASI menurut pemberian makanan pada Balita di DKI Jakarta, Tahun 1993 - 1995.....	46
Tabel 5.7.	Distribusi persentase Balita menurut penolong kelahiran di DKI Jakarta, Tahun 1993 - 1995.....	46
Tabel 6.1.	Persentase rumahtangga menurut luas lantai bangunan dan kotamadya di DKI Jakarta, Tahun 1990 - 1995.....	55
Tabel 6.2.	Distribusi persentase rumahtangga menurut kotamadya dan sumber air mandi di DKI Jakarta, Tahun 1980 - 1990.....	56
Tabel 6.3.	Distribusi persentase rumahtangga menurut kotamadya dan sumber air minum di DKI Jakarta, Tahun 1993 dan 1995.....	57

Tabel 6.4.	Distribusi persentase rumahtangga menurut kotamadya dan tempat buang air besar di DKI Jakarta, Tahun 1993 dan 1995.....	58
Tabel 6.5.	Persentase rumahtangga menurut kotamadya dan jarak pompa/sumur ke penampungan kotoran di DKI Jakarta, Tahun 1993 dan 1995.....	59
Tabel 6.6.	Persentase rumahtangga menurut kotamadya dan tempat penampungan kotoran akhir di DKI Jakarta, Tahun 1995.....	59
Tabel 7.1.	Distribusi pendapatan dan Gini Ratio DKI Jakarta, Tahun 1980 - 1990.....	67
Tabel 7.2.	Rata-rata pengeluaran makanan per kapita sebulan menurut jenis pengeluaran sebulan (Rp) di DKI Jakarta, Tahun 1990 - 1993.....	68
Tabel 7.3.	Rata-rata pengeluaran non-makanan per kapita sebulan menurut jenis pengeluaran sebulan (Rp) di DKI Jakarta, Tahun 1990 - 1993.....	69
Tabel 7.4.	Distribusi persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan dan bahan makanan di DKI Jakarta, Tahun 1984 - 1993.....	69
Tabel 7.5.	Rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari menurut jenis bahan makanan di DKI Jakarta, Tahun 1984 - 1993 (Gram).....	70
Tabel 7.6.	Rata-rata konsumsi protein per kapita sehari menurut jenis bahan makanan di DKI Jakarta, Tahun 1984 - 1993 (Gram).....	71
Tabel 7.7.	Distribusi persentase rumahtangga menurut tingkat perkembangan kesejahteraan konsumsi bahan makanan rumahtangga di DKI Jakarta, Tahun 1988 - 1993.....	72

Tabel 8.1.	Persentase Penduduk yang melakukan perjalanan wisata menurut jenis kelamin di DKI Jakarta, Tahun 1992 - 1995.....	81
Tabel 8.2.	Distribusi persentase penduduk usia 10 tahun ke atas menurut akses terhadap Media Massa, Jenis Kelamin di DKI Jakarta, Tahun 1992, 1993 dan 1995.....	82
Tabel 8.3.	Distribusi persentase penduduk yang menjadi korban kejahatan menurut jenis kelamin di DKI Jakarta, Tahun 1992, 1995.....	83
Tabel 8.4.	Banyaknya peristiwa kriminal yang dilaporkan, angka kriminal per 10.000 penduduk dan skala waktu peristiwa kejahatan, Tahun 1988 - 1994.....	83
Tabel 8.5.	Distribusi persentase beberapa jenis kejahatan terhadap jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan di DKI Jakarta, Tahun 1988 - 1994.....	84
Tabel 8.6.	Persentase penyelesaian beberapa peristiwa kejahatan/pelanggaran yang dilaporkan, Tahun 1988 - 1994.....	85
Tabel 8.7.	Peluang terjadinya kecelakaan lalu lintas per kendaraan skala waktu peristiwa kecelakaan dan rata-rata peristiwa kecelakaan per bulan, Tahun 1988 - 1994.....	86
Tabel 8.8.	Persentase rumahtangga menurut perkembangan rasa aman dari tindak kejahatan selama tiga tahun terakhir di DKI Jakarta, Tahun 1991 dan 1994.....	86
Tabel 8.9.	Distribusi persentase tempat peribadatan di DKI Jakarta, Tahun 1990 - 1994.....	87
Tabel 8.10.	Jumlah dan Indeks (1988 = 100) Jemaah Haji DKI Jakarta, Tahun 1988 - 1994.....	87
Tabel 8.11.	Jumlah jemaah haji DKI Jakarta yang terdaftar, persentase yang berangkat, meninggal dan kembali, Tahun 1988 - 1994.....	88

Tabel 8.12.	Banyaknya orang tua yang memperoleh santunan menurut jenis sarana dan ratio total per 10.000 penduduk usia 65 tahun ke atas di DKI Jakarta, Tahun 1989 - 1994.....	88
Tabel 8.13.	Jumlah panti asuhan dan anak yang ditampung menurut kotamadya di DKI Jakarta, Tahun 1989 - 1994.....	89
Tabel 8.14.	Distribusi persentase gubuk liar menurut kotamadya di DKI Jakarta, Tahun 1990 - 1994.....	90

<https://jakarta.bps.go.id>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Ruang Lingkup

Pembangunan yang dilakukan sejak Republik Indonesia bebas dari alam penjajahan sampai dengan saat ini, tak lain diperuntukkan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun demikian, kesejahteraan yang akan diwujudkan itu sendiri mencakup banyak sisi dan dimensi yang kompleks, karena usaha ini merupakan tiang penyangga penciptaan manusia Indonesia seutuhnya. Ini berarti yang dikejar tidak hanya sisi kemajuan lahiriah, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan dan sebagainya, tetapi juga sisi kepuasan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, kemudahan mendapatkan informasi, kemudahan menjalankan ibadah dan lainnya. Sejalan dengan itu, perlu diusahakan adanya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah tersebut. Disamping itu, kesejahteraan yang diusahakan harus juga memperhatikan dimensi pemerataan yaitu pembangunan yang merata ke segenap pelosok tanah air dan semua lapisan masyarakat.

Sampai dengan akhir Repelita V, telah banyak perubahan yang terjadi, peningkatan kesejahteraan rakyat di berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, pendapatan dan bidang budaya sosial lainnya. Meskipun demikian masalah kependudukan seperti tingginya laju pertumbuhan penduduk, terutama yang disebabkan oleh tingginya migrasi yang masuk, persebarannya yang tidak merata, struktur penduduknya yang relatif muda dengan modus pendidikan yang rendah masih merupakan faktor penghambat usaha peningkatan kesejahteraan rakyat di kota metropolitan.

Untuk melihat tingkat kesejahteraan di DKI Jakarta diperlukan suatu ukuran atau indikator dari kesejahteraan itu sendiri. Mengingat begitu luasnya dimensi kesejahteraan rakyat ditambah lagi dengan keterbatasan data yang tersedia sehingga tidak semua aspek yang mendukung kesejahteraan rakyat akan dibahas dalam publikasi ini.

Aspek-aspek kesejahteraan yang akan diulas adalah aspek kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendapatan, perumahan dan aspek lainnya.

1.2 Tujuan Penulisan

Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) DKI Jakarta tahun 1995 ini bertujuan untuk:

1. Memberikan gambaran tentang taraf pemerataan dan perkembangan kesejahteraan rakyat sebagai dampak pembangunan yang telah dilakukan.
2. Sebagai masukan bagi Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk perencanaan pembangunan selanjutnya.

1.3 Jenis dan Sumber Data

Indikator Kesejahteraan Rakyat tahun 1995 ini menyajikan informasi dalam dua bentuk yaitu ulasan dan tabel-tabel. Pada setiap bab disertakan ulasan singkat untuk membantu pembaca menangkap gambaran yang disajikan dalam bab yang bersangkutan. Tabel-tabel memuat beragam jenis indikator dalam bentuk jumlah, persentase, rasio yang ditata menurut runtun berkala dan diolah dari berbagai sumber. Sedangkan berbagai sumber data yang digunakan di dalam buku ini dapat dilihat sebagai berikut.

a. Sensus Penduduk

Sebagian besar data sensus yang muncul di dalam Indikator Kesejahteraan Rakyat tahun 1995 ini masih menampilkan hasil Sensus Penduduk 1980 dan 1990. Sensus ini merupakan proyek nasional yang bertujuan untuk mengumpulkan data tentang penduduk dan rumahtangga di seluruh Indonesia. Kedua sensus ini menggunakan dua cara pencacahan yaitu pencacahan secara lengkap dan sampel. Pencacahan lengkap meliputi semua orang yang berada di wilayah geografis Indonesia pada saat pencacahan, baik Warga Negara Indonesia maupun

Warga Negara Asing (kecuali korps diplomatik beserta keluarganya) awak kapal berbendera Indonesia dalam perairan Indonesia, maupun para tunawisma yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap. Pencacahan sampel mencakup semua penduduk yang bertempat tinggal di blok-blok sensus terpilih sebagai sampel yang diambil dengan metode sampling bertingkat.

b. Survei Sosial Ekonomi Nasional

Kegiatan Susenas secara nasional dilakukan setiap tahun Survei ini merupakan kegiatan pengumpulan data yang mencakup berbagai aspek sosial dan ekonomi yang cukup kompleks. Oleh karena itu di dalam pelaksanaannya, kegiatan ini dibagi-bagi menurut kelompok sasaran (modul) tertentu dan biasanya akan diulang secara periodik dalam kurun waktu 3 tahunan. Susenas mengumpulkan berbagai informasi seperti kependudukan, kesehatan, fertilitas, pengeluaran rumah tangga, kriminalitas dan perumahan serta lingkungan. Ciri-ciri penting penduduk seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, hubungan dengan kepala keluarga dan pendidikan dikumpulkan melalui pertanyaan data pokok (kor) yang dikumpulkan setiap tahun.

c. Penelitian Statistik Fisik Perkotaan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengumpulan data yang ditampung oleh mata anggaran daerah. Penelitian ini mencakup tiga pokok atau satuan amatan kondisi fisik kota yang mencakup keterangan yang dapat diberikan oleh kelurahan, kondisi fisik pendidikan yang dapat diberikan oleh sekolah dan perkembangan Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

d. Sumber Data Lainnya

Selain dari sensus dan survei yang dilakukan oleh intern Biro Pusat Statistik beserta aparatnya di daerah atau Kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta bersama

Pemerintah Daerah, Inkesra DKI Jakarta tahun 1995 ini juga mengambil data dari catatan administrasi Kantor Wilayah Departemen/Instansi Pemerintah sebagai sumber sekunder dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Polda Metro Jaya, Biro-biro dan Dinas-dinas di lingkungan Pemda DKI Jakarta. Disamping itu, juga ada yang berasal dari survei-survei dimana aparat Kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta ditunjuk sebagai supervisor atau anggota team pendampingnya seperti Penyusunan Neraca Lingkungan Hidup.

1.4 Sistematika

Inkesra DKI Jakarta tahun 1995, indikator yang akan diulas dikelompokkan ke dalam 7 kelompok yaitu; Kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, pendapatan dan pengeluaran, perumahan, dan indikator lainnya.

Dalam Bab II Kependudukan dibahas sejumlah indikator penting lain pertumbuhan dan komposisi penduduk, status dan usia perkawinan, kelahiran dan kematian, serta pemakaian alat/cara KB. Perubahan-perubahan pada indikator ini mencerminkan kecenderungan atau perubahan yang menyangkut kesejahteraan penduduk. Banyak analisis kependudukan meyakini bahwa perubahan pada indikator kependudukan banyak dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan total masyarakat.

Indikator pendidikan yang dipaparkan dalam Bab III dapat menceritakan tentang taraf salah satu kebutuhan dasar (basic needs) yang akan dicapai oleh masyarakat ibu kota. Bab ini kemudian disusul oleh ketenagakerjaan. Upaya yang ingin diungkapkan pada Bab IV ini adalah untuk mengkaji sampai berapa jauh perubahan struktural ketenagakerjaan di kampung besar ini.

Dalam Bab V, VI dan VII masing-masing menyajikan tentang kesehatan, pendapatan dan pengeluaran, serta perumahan. Pembahasan pada bab-bab ini cukup menarik mengingat fokusnya tidak hanya berkaitan dengan taraf hidup masyarakat tetapi juga dengan lingkungannya. Selanjutnya, pembahasan diakhiri dengan pembahasan indikator lainnya seperti kriminalitas dan akses terhadap media massa.

BAB II **KEPENDUDUKAN**

2.1 Pertumbuhan dan Komposisi Penduduk

1. Pertumbuhan Penduduk

Salah satu masalah kependudukan yang terdapat di Indonesia adalah besarnya jumlah penduduk dan terutama menumpuk di usia muda. Masalah ini terjadi pula di tingkat propinsi. Jumlah penduduk di DKI Jakarta terus meningkat, pada tahun 1980 jumlah penduduk mencapai 6,5 juta jiwa dan selang waktu sepuluh tahun kemudian jumlah ini meningkat menjadi 8,2 juta jiwa dan pada tahun 1995 jumlah penduduk DKI Jakarta telah diperkirakan mencapai 9,2 juta jiwa.

Tabel 2.1 memperlihatkan bahwa walaupun terjadi peningkatan jumlah penduduk tetapi angka pertumbuhannya mengalami penurunan. Selang waktu 1980-1990, laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,41 persen per tahun, kemudian periode 1990-1995 menurun menjadi 2,09 persen per tahun. Keadaan ini cukup menggembirakan karena laju pertumbuhan penduduk ibukota ini secara berangsur-angsur dapat diturunkan. Disamping pemerataan penyebarannya, penurunan laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu tujuan nasional yang ingin dicapai dengan berbagai upaya.

Laju pertumbuhan penduduk ini harus terus diturunkan, karena angka yang dicapai oleh DKI Jakarta masih lebih tinggi dibandingkan dengan angka Indonesia. Pada periode 1980-1990, laju pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,98 persen per tahun menurun menjadi 1,66 persen per tahun periode 1990-1995.

Komponen yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah kelahiran, kematian dan perpindahan. Untuk tingkat Indonesia migrasi netto dianggap tidak ada, sehingga yang sangat mempengaruhi penurunan pertumbuhan penduduk adalah tingkat kelahiran disamping kematian. Keadaan yang sedikit berbeda terjadi di DKI Jakarta, dimana pertumbuhan penduduknya dipengaruhi oleh ketiga komponen tadi. Meskipun telah berhasil diturunkan, namun laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta melebihi tingkat nasional.

Pola pertumbuhan penduduk di DKI Jakarta terjadi pula di tingkat kotamadya. Di semua kotamadya terjadi penurunan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di Jakarta Barat dan Jakarta Timur merupakan yang tertinggi di DKI Jakarta dan yang terendah terjadi di Jakarta Pusat bahkan bernilai negatif. Dalam rentang waktu 1990-1995 laju pertumbuhan penduduk di Jakarta Barat dan Jakarta Timur masing-masing diperkirakan 3,41 dan 2,97 persen per tahun sedangkan di Jakarta Pusat mencapai -1,97 persen per tahun. Pengembangan wilayah ke arah barat dan timur DKI Jakarta dan disertai dengan pengembangan sektor industri menjadi daya tarik pendatang untuk tinggal di wilayah tersebut, sehingga wajar jika pertumbuhan penduduk kedua kotamadya ini merupakan yang tertinggi. Sedangkan jumlah penduduk di kotamadya Jakarta Pusat mengalami penurunan, dan ini dimungkinkan karena fungsi wilayah Jakarta Pusat ditujukan untuk kegiatan bisnis sedangkan daerah pemukiman dialihkan ke wilayah Barat, Timur dan Selatan Jakarta (Tabel 2.1).

Dengan luas wilayah yang hanya mencapai 661,26 km², kepadatan di DKI Jakarta pada tahun 1980 mencapai 9.808 jiwa per KM² meningkat menjadi 12.435 jiwa pada tahun 1990 dan tahun 1995 diperkirakan mencapai 13 853 jiwa per KM² (Tabel 2.2).

Pola perkembangan kepadatan di tiap kotamadya hampir sama dengan tingkat propinsi yaitu mengalami peningkatan kecuali Jakarta Pusat yang mengalami penurunan. Walaupun menurun, tingkat kepadatan di Jakarta Pusat tetap merupakan yang tertinggi di DKI Jakarta yaitu diperkirakan 20.303 jiwa per KM² pada tahun 1995. Tingkat kepadatan yang tinggi di kotamadya ini disebabkan karena luas wilayahnya merupakan yang tersempit dibandingkan dengan 4 kotamadya lainnya seluas 47,90 per KM². Kotamadya yang relatif jarang penduduknya adalah Jakarta Utara dengan luas wilayah 154,11 per KM², kepadatan penduduknya diperkirakan hanya sekitar 10.224 per KM² pada tahun 1995.

2. Komposisi Penduduk

Tabel 2.3 memperlihatkan komposisi penduduk DKI Jakarta menurut jenis kelamin dimana jumlah penduduk laki-laki lebih besar dibanding dengan jumlah penduduk wanita. Pada tahun 1990 jumlah penduduk DKI Jakarta terdiri dari 4.153.586 laki-laki (50,48 persen) dan 4.074.160 wanita (49,52 persen). Pada tahun 1993 dan 1995 jumlah penduduk laki-laki tetap lebih besar dibanding penduduk wanita hanya saja persentasenya mengalami penurunan menjadi 50,31 persen (1993) dan 50,21 persen (1995). Indikasi yang dapat diambil adalah pertumbuhan penduduk wanita lebih tinggi dibanding laki-laki.

Dilihat dari komposisi kelompok umur maka penduduk DKI Jakarta dapat dikategorikan sebagai penduduk muda. Tetapi persentase penduduk muda ini selama periode 1990-1995 menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 1990, persentase penduduk dibawah 20 tahun cukup tinggi yaitu sekitar 45 persen menurun menjadi 41 persen (tahun 1993) dan 40 persen (tahun 1995). Diduga bahwa turunnya persentase kelompok umur muda ini karena berkaitan erat dengan menurunnya angka kelahiran di DKI Jakarta.

Persentase penduduk laki-laki yang masih di atas 50 persen menyebabkan rasio jenis kelamin di DKI Jakarta masih di atas 100 (Tabel 2.4). Pada tahun 1990, rasio jenis kelamin mencapai 101,94 yang memberi gambaran bahwa setiap 100 wanita terdapat sekitar 102 laki-laki. Rasio jenis kelamin ini mengalami penurunan pada tahun 1995 yaitu mencapai 100,88. Seperti yang telah diduga sebelumnya bahwa penurunan rasio jenis kelamin ini secara keseluruhan memberi indikasi bahwa peningkatan penduduk wanita lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Disamping itu, dari berbagai temuan empiris bahwa harapan hidup wanita pun lebih tinggi dari laki-laki.

Jika dilihat menurut golongan umur, maka kelompok umur 15-29 tahun merupakan kelompok umur dimana rasio jenis kelamin tercatat yang terendah bahkan lebih rendah dari 100. Kelompok umur tersebut merupakan kelompok umur dimana tingkat mobilitas sangat tinggi. Penduduk laki-laki pada golongan umur 20-54 tahun diduga banyak yang keluar dari DKI Jakarta dan secara bersamaan banyak pendatang

wanita dalam kelompok umur yang sama datang ke Jakarta sebagai pembantu rumahtangga.

2.2 Status dan Usia Perkawinan

Pada tahun 1995, laki-laki usia 10 tahun ke atas yang berstatus belum kawin hampir mencapai 50 persen dari total penduduk laki-laki, dan persentase ini tidak jauh berbeda dengan keadaan pada tahun 1980 dan 1990. Sedangkan persentase penduduk wanita yang belum kawin terus mengalami peningkatan sejak tahun 1980 hingga tahun 1995. Pada tahun 1980, persentase wanita yang belum kawin tercatat sekitar 39 persen dan pada tahun 1995 persentase ini meningkat menjadi 44 persen. Peningkatan persentase wanita belum kawin ini diduga karena meningkatnya usia kawin pertama mereka (Tabel 2.5).

Penduduk yang berstatus cerai hidup baik laki-laki maupun wanita menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun. Ada dugaan bahwa penurunan ini disebabkan oleh semakin menurunnya kasus perceraian atau mereka yang sebelumnya berstatus duda/janda telah kawin kembali.

Persentase penduduk laki-laki yang berstatus cerai lebih rendah jika dibandingkan dengan wanita yang berstatus cerai. Hal ini mungkin disebabkan karena laki-laki yang bercerai atau ditinggal mati oleh istrinya lebih cepat untuk menikah kembali. Sedangkan wanita cenderung untuk tidak menikah kembali setelah bercerai atau ditinggal mati suaminya.

Tabel 2.6 memperlihatkan persentase penduduk pernah kawin menurut umur perkawinan pertamanya. Usia perkawinan pertama wanita sangat penting karena akan berpengaruh pada lamanya waktu reproduksi yang pada gilirannya akan mempengaruhi angka kelahiran suatu daerah. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi umur perkawinan pertama seorang wanita diantaranya yaitu tingkat pendidikan maupun masuknya wanita ke dalam pasar kerja.

Umur perkawinan pertama wanita pada tahun 1992 dan 1995 tidak menunjukkan keadaan yang berbeda. Umur perkawinan yang tertinggi tercatat pada golongan umur

19-24 tahun, yaitu 45 persen pada tahun 1992 dan naik menjadi 48 persen pada tahun 1995. Telah diduga sebelumnya bahwa meningkatnya persentase wanita yang belum kawin disebabkan karena meningkatnya umur perkawinan pertama. Ternyata dugaan tersebut didukung oleh data yang menunjukkan bahwa persentase wanita yang kawin di bawah usia 19 tahun mengalami penurunan, dan sebaliknya wanita yang kawin di atas usia 19 tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 1992, wanita yang kawin di bawah usia 19 tahun tercatat sebesar 42.68 persen, persentase ini menurun menjadi 39.49 persen pada tahun 1995.

2.3 Kelahiran dan Kematian

Pada bagian terdahulu diulas bahwa komponen pertumbuhan penduduk adalah kelahiran, kematian dan migrasi netto. Kelahiran dan kematian mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk alami di suatu daerah.

Tabel 2.7 memperlihatkan rata-rata anak yang dilahirkan hidup per 10 wanita pernah kawin berumur 15-49 tahun di DKI Jakarta. Pada tahun 1980 tercatat rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh 10 wanita pernah kawin adalah 35 anak, angka ini terus mengalami penurunan walaupun relatif lambat. Pada tahun 1995, rata-rata anak yang dilahirkan sebesar 25 anak tiap 10 wanita pernah kawin.

Penurunan rata-rata anak yang dilahirkan ini diduga disebabkan karena meningkatnya kesadaran wanita pernah kawin untuk membatasi jumlah anaknya. Pelaksanaan program KB di DKI Jakarta diarahkan kepada program KM Mandiri yang bertujuan agar pasangan muda secara sadar turut bertanggungjawab dalam pembatasan jumlah anak yang dilahirkannya.

Angka fertilitas total di DKI Jakarta ditampilkan pada Tabel 2.8. Pada tahun 1990, angka fertilitas total tercatat sebesar 2.326 yang memberi arti bahwa wanita usia subur di DKI Jakarta akan melahirkan anak sekitar 2 - 3 anak sampai dengan akhir masa reproduksinya. Angka ini menurun menjadi 2.138 pada tahun 1993 dan 1.903 pada tahun 1994. Penurunan angka fertilitas di bawah 2 merupakan suatu prestasi tersendiri bagi DKI Jakarta karena sesuai dengan program KB maka wanita di Indonesia diharapkan

hanya mempunyai anak sebanyak 2 orang sampai akhir masa reproduksinya. Banyak faktor yang diduga dapat menurunkan Angka Fertilitas Total antara lain adalah meningkatnya umur perkawinan pertama wanita dan pemakaian alat/cara kontrasepsi (KB). Umur perkawinan yang semakin meningkat akan menyebabkan masa reproduksi wanita semakin pendek dan dengan sendirinya anak yang dilahirkannya pun akan semakin sedikit. Sedangkan pemakaian alat/cara KB dapat berfungsi untuk menjarangkan (spacing) dan menghentikan (stopping) kelahiran. Di DKI Jakarta, turunnya angka fertilitas ini karena akseptor memakai alat/cara KB untuk membatasi jumlah anak yang dilahirkan.

Angka kelahiran kasar yang terjadi di DKI Jakarta memperlihatkan kecenderungan yang semakin menurun sejak tahun 1990 hingga 1995. Pada tahun 1990 tercatat sekitar 26 kelahiran per 1000 penduduk, angka ini diperkirakan menurun menjadi sekitar 21 kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 1995.

Berbeda halnya dengan kelahiran maka angka kematian kasar memperlihatkan kecenderungan yang meningkat meskipun relatif kecil. Pada tahun 1993, angka kematian kasar tercatat sekitar 4 orang per 1000 penduduk meningkat menjadi hampir 5 orang per 1000 penduduk. Peningkatan angka kematian ini antara lain disebabkan oleh semakin banyaknya penduduk usia tua dan semakin beragamnya jenis penyakit atau kecelakaan di perkotaan yang semakin padat.

Salah satu indikator kesejahteraan suatu daerah adalah angka harapan hidup yang dicapai oleh daerah tersebut. Meningkatnya angka harapan hidup memberi gambaran bahwa tingkat kesejahteraan di daerah tersebut pun semakin meningkat. Di DKI Jakarta angka harapan hidup penduduknya terus mengalami peningkatan, pada tahun 1990 angka harapan hidup penduduk DKI Jakarta mencapai 66 tahun, kemudian pada tahun 1995 harapan hidup penduduk DKI Jakarta diperkirakan bertambah sekitar 4 tahun menjadi 70 tahun. Pada umumnya, angka harapan hidup wanita lebih tinggi dari laki-laki, hal seperti itu pula yang terjadi di DKI Jakarta. Jika ditengok ke belakang maka penyebab angka harapan hidup perempuan lebih tinggi karena dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi perempuan yang lebih rendah dari kematian bayi laki-laki. Bayi perempuan

umumnya mempunyai daya tahan yang lebih kuat terhadap penyakit dibandingkan dengan bayi laki-laki.

2.4 Pemakaian Alat/Cara Keluarga Berencana

Pada bagian terdahulu telah disinggung bahwa pemakaian alat/cara KB sangat berperan dalam menurunkan angka fertilitas di DKI Jakarta. Wanita pernah kawin semakin menyadari pentingnya pembatasan jumlah anak dalam mencapai kesejahteraan keluarga yang diinginkan. Oleh karena itu, wanita yang menjadi akseptor Keluarga Berencana semakin banyak. Tabel 2.9 memperlihatkan persentase wanita kawin usia 15 - 49 tahun menurut pemakaian alat KB di DKI Jakarta.

Pada tahun 1992 tercatat sekitar 750 ribu wanita kawin yang memakai alat KB. Alat KB populer adalah suntikan, IUD dan pil. Akseptor KB suntikan sekitar 32 persen, IUD sekitar 32 persen dan pil sekitar 21 persen. Penyebab populernya jenis KB suntikan diduga karena alat ini walaupun jangka waktu efektifitas alat relatif pendek tetapi tidak merepotkan akseptor. Populernya alat KB IUD ini karena jangka waktu pemakaiannya cukup lama juga cukup efektif dalam mencegah kehamilan.

Pil cukup populer karena alat ini mudah didapat. Sedangkan alat KB yang tidak populer adalah Vasektomi (Modus operasi Pria) yaitu kurang dari 1 persen, susuk KB 1.5 persen dan kondom 2 persen. Jenis alat KB yang tidak populer ini memberikan suatu indikasi bahwa suami masih rendah partisipasinya dalam penggunaan alat kontrasepsi ini. Dengan kata lain pemakaian alat kontrasepsi lebih digantungkan kepada wanita.

Pada tahun 1995 jumlah akseptor KB sudah mencapai 850 ribu orang. Alat/cara KB suntikan dan pil pada tahun 1995 semakin populer sedangkan IUD menurun jumlah pemakainya. Akseptor KB suntikan dan pil naik menjadi 37 persen dan 27 persen, sedangkan akseptor KB IUD menurun menjadi 23 persen. Persentase akseptor KB IUD yang semakin turun diduga karena mereka mengganti jenis alat dengan alat yang tidak merepotkan dan mudah di dapat seperti suntikan dan pil.

Tabel 2.1 Proporsi dan Pertumbuhan Penduduk Menurut Kotamadya
Di DKI Jakarta Tahun 1980, 1990 dan 1995

Kotamadya	Proporsi Penduduk			Pertumbuhan Penduduk per tahun 1980-1990 (%)	Pertumbuhan Penduduk per tahun 1990-1995 (%)
	1980	1990	1995		
Jakarta Selatan	24,36	23,16	22,28	1,89	1,33
Jakarta Timur	22,46	25,10	26,25	3,55	2,97
Jakarta Pusat	19,08	13,06	10,62	-1,40	-1,97
Jakarta Barat	19,04	22,12	23,65	3,96	3,41
Jakarta Utara	15,06	16,56	17,20	3,40	282
DKI Jakarta	100,00	100,00	100,00	2,41	2,09

Sumber: - BPS, 1980, Penduduk DKI Jakarta, Hasil Sensus Penduduk 1980 Serie S Nomor 11, Jakarta.
- BPS, 1993, Proyeksi Penduduk per Propinsi 1990-2000, BPS, Jakarta.
- Kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta, 1992 Penduduk DKI Jakarta Hasil Sensus Penduduk 1990.

Tabel 2.2. Kepadatan Penduduk menurut Kotamadya di DKI Jakarta,
Tahun 1980, 1990 dan 1995.

Kotamadya	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan (Jiwa/Km2)		
		1980	1990	1995
Jakarta Selatan	145.37	10.897	13.105	14.043
Jakarta Timur	187.73	7.781	10.997	12.808
Jakarta Pusat	47.90	25.677	22.437	20.303
Jakarta Barat	126.15	9.579	14.390	17.174
Jakarta Utara	154.11	6.329	8.922	10.224
DKI Jakarta	661.26	9.808	12.435	13.853

Sumber: BPS, 1993. Proyeksi Penduduk Indonesia per Kodya 1990 - 2000. BPS. Jakarta.

Tabel 2.3. Distribusi persentase penduduk menurut golongan umur dan Jenis kelamin di DKI Jakarta, Tahun 1980, 1990 dan 1995.

Golongan Umur	1980			1990			1993			1995		
	L	P	L+P									
00 - 04	15.11	14.79	14.95	10.36	10.19	10.27	10.19	9.95	10.07	10.28	9.98	10.13
05 - 09	12.92	12.61	12.77	11.49	11.34	11.42	10.23	9.98	10.10	9.48	9.25	9.36
10 - 14	11.27	11.37	11.32	10.84	11.13	10.99	10.39	10.42	10.40	10.14	10.02	10.08
15 - 19	11.40	13.39	12.38	11.05	12.78	11.91	10.16	11.50	10.82	9.63	10.46	10.05
20 - 24	11.24	12.15	11.69	11.81	13.05	12.42	11.57	13.51	12.54	10.99	13.18	12.08
25 - 29	9.60	9.01	9.41	11.23	11.03	11.13	12.03	12.22	12.12	12.20	12.87	12.54
30 - 34	6.82	6.34	6.58	9.04	8.29	8.67	9.96	9.12	9.54	10.64	9.78	10.21
35 - 39	6.06	5.70	5.88	6.70	6.00	6.35	7.16	6.50	6.84	7.61	6.92	7.21
40 - 44	5.04	4.52	4.78	4.98	4.53	4.76	5.24	4.74	4.99	5.47	4.94	5.20
45 - 49	3.48	3.17	3.33	4.04	3.64	3.84	4.06	3.68	3.88	4.13	3.73	3.83
50 - 54	2.81	2.54	2.68	3.17	2.83	3.00	3.27	2.93	3.10	3.29	2.97	3.13
55 - 59	1.58	1.47	1.52	2.17	2.00	2.09	2.42	2.17	2.30	2.52	2.28	2.40
60 - 64	1.15	1.24	1.19	1.44	1.38	1.41	1.54	1.47	1.50	1.66	1.57	1.62
65 +	1.32	1.70	1.51	1.65	1.80	1.72	1.76	1.81	1.78	1.96	2.05	2.00
DKI Jakarta	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: - BPS, 1993. Proyeksi Penduduk Indonesia Per Kodya 1990 - 2000. BPS, Jakarta

Keterangan: L = Laki-laki

P = Perempuan

Tabel 2.4. Rasio jenis kelamin menurut golongan umur,
DKI Jakarta, tahun 1990, 1993, dan 1995.

Golongan Umur	1990	1993	1995
00 - 04	103,60	103,70	103,89
05 - 09	103,30	103,81	103,44
10 - 14	99,27	101,03	102,01
15 - 19	88,16	89,49	92,91
20 - 24	92,30	86,69	84,13
25 - 29	103,74	99,62	95,62
30 - 34	111,14	110,80	109,71
35 - 39	113,81	111,54	110,93
40 - 44	112,14	112,07	111,63
45 - 49	113,10	111,67	111,88
50 - 54	114,53	113,11	111,90
55 - 59	110,49	112,62	111,66
60 - 64	106,93	106,08	106,69
65 +	93,60	98,86	96,35
DKI Jakarta	101,94	100,88	101,27

Sumber : BPS. 1993. Proyeksi Penduduk Indonesia Per Propinsi 1990-2000, BPS, Jakarta.

Tabel 2.5. Distribusi persentase penduduk usia 10 tahun ke atas
menurut Status Perkawinan dan Jenis Kelamin,
DKI Jakarta, Tahun 1990, 1993 dan 1995.

Status Perkawinan	1990		1993		1995	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
Belum Kawin	48,96	39,29	50,24	43,17	49,75	44,34
Kawin	49,59	50,45	48,33	48,90	49,03	47,67
Cerai Hidup	0,62	3,64	0,59	2,55	0,30	2,21
Cerai Mati	0,83	6,62	0,82	5,38	0,92	5,78
Jumlah	100,00 2.361.977	100,00 2.322.247	100,00 3.234.790	100,00 3.252.057	100,00 3.718.716	100,00 3.755.081

Sumber: - BPS. 1982. Penduduk Hasil DKI Jakarta Hasil SP 1980
- KSP DKI Jakarta. 1992. Penduduk DKI Jakarta Hasil SP'90.
- Susenas 1995, BPS

Tabel 2.6. Distribusi persentase penduduk wanita pernah kawin menurut usia perkawinan pertama di DKI Jakarta, Tahun 1992 dan 1995.

Usia Perkawinan Pertama	1992	1995
< 16 tahun	18,49	16,49
17 - 18 tahun	24,19	23,00
19 - 24 tahun	45,34	47,57
25 tahun ke atas	11,98	12,92
Jumlah	100,00	100,00

Sumber : Susenas 1992 dan 1995

Tabel 2.7. Rata-rata Anak yang pernah dilahirkan hidup per 10 wanita pernah kawin berumur 15 - 49 tahun, DKI Jakarta. Tahun 1980 - 1995.

Tahun	Rata-rata anak yang pernah dilahirkan per 10 wanita pernah kawin
1980	35
1990	29
1994	29
1995	25

Sumber: 1. BPS, 1982. Penduduk DKI Jakarta Hasil SP 1980
 2. BPS, 1992. Penduduk DKI Jakarta Hasil SP 1990
 3. Susenas 1994 dan 1995, BPS

Tabel 2.8. Angka fertilitas total, Angka kelahiran kasar, Angka kematian kasar dan Angka harapan hidup, DKI Jakarta, Tahun 1990 - 1995.

Ukuran	1990	1993	1994	1995
1. Angka fertilitas total per wanita usia subur	2.326	2.138	1.903	-
2. Angka kelahiran kasar per 1000 penduduk	25,79	21,36	21,21	20,99
3. Angka kematian kasar per 1000 penduduk	5,99	4,26	4,51	4,89
4. Angka harapan hidup (tahun)				
Laki-laki	64,3	67,0	67,3	67,6
Perempuan	68,2	71,0	71,3	71,6
Jumlah	66,3	69,1	69,4	69,7

Sumber : 1. Biro Statistik Demografi dan Ketenagakerjaan, Estimasi Parameter Demografi. BPS
 2. BPS. 1990. Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 1987.
 3. BPS. 1993. Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 1991.
 4. BPS. 1995. Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 1994.

Tabel 2.9. Distribusi persentase Wanita kawin usia 15 - 49 tahun menurut pemakaian alat KB, DKI Jakarta, Tahun 1992 dan 1995.

Jenis alat Keluarga Berencana	1992	1995
MOW / Tubektomi	6,22	4,16
MOP / Vasektomi	0,88	1,63
IUD	30,22	23,38
Suntikan	31,82	37,31
PIL	21,13	27,12
Kondom	2,23	0,92
Susuk Keluarga Berencana	1,52	1,28
Alat modern lainnya	3,11	2,55
Alat / Cara lainnya	2,87	1,65
Jumlah	100,00	100,00
	754.908	848.200

Sumber : Susenas 1992 dan 1995, BPS

BAB III PENDIDIKAN

Sumber daya manusia berperan sangat penting terhadap kemajuan suatu bangsa, oleh karena itu perlu diupayakan peningkatannya demi tercapainya keberhasilan pembangunan. Salah satu peningkatan sumber daya manusia adalah peningkatan kualitas melalui bidang pendidikan. Dalam hal ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain pelaksanaan program paket dan wajib belajar 6 tahun yang telah dilaksanakan sekitar tahun 1980. Dalam kurun waktu 10 tahun kemudian terbukti telah dapat mengurangi angka buta huruf, meskipun hingga saat ini penduduk DKI Jakarta belum dapat dikatakan bebas buta aksara. Kemudian, pada tahun 1994 program wajib belajar ditingkatkan menjadi 9 tahun yang berarti menunda anak-anak untuk tidak segera ke lapangan kerja. Melalui program ini tentunya diharapkan agar jumlah penduduk terutama usia sekolah yang buta huruf semakin berkurang. Akhirnya, melalui pemerataan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk. Untuk mengetahui keadaan pendidikan di DKI Jakarta, berikut diuraikan ulasan singkat dari beberapa indikator yang disajikan dalam bab ini.

3.1. Buta Huruf.

Salah satu keberhasilan program pendidikan ditunjukkan dengan semakin berkurangnya tingkat buta huruf penduduk yang berumur 10 tahun ke atas. Tingkat buta huruf merupakan bagian dari indikator kemampuan penduduk untuk berkomunikasi secara tertulis. Kemampuan baca tulis merupakan pengetahuan minimum yang dibutuhkan oleh penduduk untuk mencapai hidup sejahtera. Berkaitan dengan hal ini, pemerintah berusaha agar penduduk laki-laki maupun perempuan di segala lapisan masyarakat dapat terbebaskan dari buta aksara. Usaha Pemerintah selama ini antara lain diwujudkan dengan program wajib belajar dan program kejar Paket A dan B.

Pada tahun 1990 persentase penduduk usia 10-44 tahun yang buta huruf sebanyak 2,05 persen dari total penduduk usia 10 tahun ke atas. Kemudian pada tahun 1995 persentase penduduk usia 10 - 44 tahun yang buta huruf sudah menurun menjadi

1,36 persen. Menurut jenis kelamin, ternyata tingkat buta huruf penduduk wanita pada tahun 1995 sebesar 2,0 persen sedangkan tingkat buta huruf penduduk laki-laki hanya 0,65 persen. Walaupun keadaan ini sudah lebih baik dibandingkan dengan tahun 1990 dimana persentase penduduk wanita yang buta huruf sebesar 3,13 persen dan penduduk laki-laki sebesar 0,96 persen, namun tetap saja tingkat buta huruf wanita masih tinggi dibandingkan dengan tingkat buta huruf laki-laki. Keadaan ini menunjukkan bahwa tingkat buta huruf penduduk DKI Jakarta sebagian besar dipengaruhi oleh tingkat buta huruf penduduk wanita yang lebih besar tersebut. Meskipun rendah, namun diferensiasi angka buta huruf laki-laki dan perempuan di atas memperlihatkan kesenjangan apakah sosial budaya maupun kesempatan antara kedua populasi itu masih ada.

Kecenderungan memperlihatkan bahwa baik pada tahun 1990 maupun tahun 1995, penduduk pada kelompok umur yang lebih tua mempunyai tingkat buta huruf yang lebih tinggi pada setiap jenis kelamin. Sebagai contoh, buta huruf penduduk wanita pada kelompok umur 25-29 tahun sebesar 3,79 persen pada tahun 1990 dan 1,66 persen pada tahun 1995. Kemudian pada kelompok umur 30 - 34 tahun, tingkat buta huruf penduduk wanita mencapai 5,12 persen pada tahun 1990 dan pada tahun 1995 sebesar 3,74 persen. Keadaan ini kemungkinan disebabkan oleh banyaknya pendatang ke DKI Jakarta yang buta huruf atau belum mengenyam pendidikan.

Pada tahun 1990, tingkat buta huruf wanita yang mencapai hampir 10 persen terdapat pada kelompok umur 40 - 44 tahun, sedangkan tingkat buta huruf untuk laki-laki pada kelompok umur 40 - 44 tahun hanya mencapai 2,3 persen. Hal ini karena sekitar 25 - 30 tahun yang lalu baik fasilitas pendidikan maupun kesejahteraan masyarakat belum memadai untuk memperoleh pendidikan. Tidak tertutup kemungkinan bahwa wanita yang buta huruf pada kelompok usia 40 - 44 tahun terdiri dari pendatang ke DKI Jakarta. Pada tahun 1995 tingkat buta huruf tertinggi hanya terdapat pada wanita kelompok 40 - 44 tahun tercatat sebesar 5,74 persen, sedangkan untuk laki-laki sebesar 1,71 persen pada kelompok umur 35-39 tahun. Data lebih lengkap dapat di lihat pada Tabel 3.1.

Selanjutnya, tingkat buta huruf wanita menurut kotamadya memperlihatkan kecenderungan penurunan antara tahun 1990 -1995 di setiap kotamadya. Namun

demikian, tingkat buta huruf penduduk wanita masih lebih besar dibandingkan dengan buta huruf laki-laki di setiap kotamadya.

Keadaan ini antara lain disebabkan oleh faktor sosial masyarakat atau pola pikir dan budaya masyarakat yang mendahulukan pendidikan anak laki-laki untuk mengenyam pendidikan (Tabel 3.2).

3.2. Partisipasi Sekolah.

Pengkajian partisipasi pendidikan penduduk DKI Jakarta pada setiap jenjang pendidikan (Sekolah dasar hingga Sekolah Menengah), diharapkan akan dapat memberikan gambaran kualitas sumber daya manusia yang potensial di masa datang. Dalam hal ini, salah satu ukuran yang digunakan untuk melihat tingkat partisipasi pendidikan adalah GER (Gross Enrollment Ratio), berdasarkan data Sensus Penduduk 1990 dan Survei Sosial Ekonomi Nasional. Definisi GER adalah penduduk yang masih sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dibagi dengan penduduk usia sekolah yang bersangkutan.

Dalam kurun waktu tahun 1990 -1995, tingkat partisipasi sekolah penduduk DKI Jakarta telah meningkat, baik wanita maupun laki-laki. Keadaan ini cukup menggembirakan karena partisipasi sekolah memang diharapkan dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Secara umum, tingkat partisipasi sekolah pada setiap jenjang pendidikan di DKI Jakarta mengalami kenaikan selama kurun waktu 1990 - 1995. Demikian pula partisipasi sekolah baik pada laki-laki maupun wanita, hasil Sensus Penduduk 1990 memperlihatkan tingkat partisipasi sekolah dasar sebesar 95,8 persen, lima tahun kemudian tingkat partisipasi sekolah dasar menjadi 97,9 persen. Selanjutnya tingkat partisipasi untuk tingkat SMTP dan SMTA tahun 1990 masing-masing sebesar 81,1 dan 50,1 persen. tahun 1995 tingkat partisipasi untuk SMTP naik 9 angka menjadi 90,2 persen dan tingkat partisipasi untuk SMTA naik 18 angka mejadi 68,5 persen. Kenaikan ini menunjukkan bahwa selain kesempatan anak untuk menikmati pendidikan sudah lebih baik, juga sarana dan prasarana untuk menunjang program pendidikan sudah lebih memadai.

Seperti tertera pada Tabel 3.3 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi sekolah pada wanita lebih rendah dibandingkan dengan partisipasi sekolah pada laki-laki selama kurun waktu 1990 -1995. Keadaan partisipasi tersebut terjadi pada setiap jenjang pendidikan yaitu dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas. Lebih lanjut dapat dikatakan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan maka tingkat partisipasi sekolah semakin berkurang.

Pada tahun 1990 tingkat partisipasi usia sekolah dasar untuk laki-laki sebesar 95,81 persen dan partisipasi wanita sebesar 95,77 persen, kemudian pada tahun 1995 tingkat partisipasi usia sekolah dasar meningkat masing-masing mencapai 98,25 persen pada laki-laki dan 97,49 persen pada wanita.

Angka partisipasi sekolah pada pendidikan dasar ini adalah paling besar bila dibandingkan dengan angka partisipasi SMTP dan SMTA. Besarnya partisipasi sekolah pendidikan dasar memperlihatkan kebijakan pemerintah tentang program wajib pendidikan dasar 9 tahun yang dimulai sejak tahun 1994 telah memberikan hasil yang cukup baik.

Pada tahun 1990 tingkat partisipasi sekolah untuk laki-laki masing-masing sebesar 95,8; 86,9 dan 64,7 persen untuk usia SD, SMTP dan SMTA, kemudian pada tahun 1995 tingkat partisipasi sekolah untuk laki-laki naik mencapai 98,2; 93,1 dan 77,5 persen untuk usia SD, SMTP dan SMTA. Selanjutnya, tingkat partisipasi sekolah untuk wanita masing-masing tercatat sebesar 95,8; 75,7 dan 50,1 persen pada tahun 1990. Lima tahun kemudian, tingkat partisipasi sekolah untuk wanita mengalami kenaikan masing-masing menjadi 97,5; 87,5 dan 61,0 persen pada usia SD, SMTP dan SMTA. Perbedaan tingkat partisipasi antara laki-laki dan wanita disebabkan oleh besarnya proporsi anak wanita yang tidak atau belum bersekolah bila dibandingkan dengan anak laki-laki. Hasil Susenas 1995 menunjukkan wanita usia 10 tahun ke atas yang tidak atau belum pernah sekolah sebesar 5,2 persen dan 1,3 persen pada laki-laki. Disamping itu, sebagian penduduk terutama yang berpenghasilan rendah masih mendahulukan anak laki-laki dibandingkan wanita dalam hal kesempatan untuk mendapatkan pendidikan.

Selanjutnya tingkat partisipasi sekolah per kotamadya tahun 1995 memperlihatkan bahwa tingkat partisipasi sekolah untuk wanita lebih rendah bila dibandingkan dengan laki-laki. Tingkat partisipasi sekolah menurut usia SD, SMTP dan SMTA mempunyai pola yang sama dengan partisipasi sekolah tingkat propinsi, yaitu dengan semakin tinggi usia sekolah maka tingkat partisipasi sekolah semakin rendah. Uraian lebih lanjut dapat disimak pada Tabel 3.4.

Angka partisipasi sekolah kasar (GER) untuk Sekolah Dasar, SMTP dan SMTA berdasarkan hasil SUSENAS 1993-1995 (Tabel 3.4) menunjukkan bahwa GER wanita lebih rendah bila dibandingkan dengan GER laki-laki. Kemudian dengan makin tinggi tingkat pendidikan, GER akan semakin rendah baik untuk laki-laki maupun wanita.

Pada tahun 1993, GER untuk Sekolah Dasar, SMTP dan SMTA tercatat masing-masing 108,34; 92,1 dan 72,6 persen. Kemudian pada tahun 1995 GER untuk Sekolah Dasar dan SMTA mengalami penurunan masing-masing menjadi 100,6 dan 71,7 persen sedangkan GER untuk SMTP naik menjadi 95,5 persen. GER untuk laki-laki dan wanita juga mempunyai pola yang sama. Angka GER laki-laki pada tahun 1993 masing-masing sebesar 109,7; 95,0 dan 83,2 persen untuk jenjang pendidikan dasar, SMTP dan SMTA, dua tahun kemudian GER Sekolah Dasar dan SMTA menurun menjadi 102,0 dan 82,5 persen sedangkan GER SMTP naik mencapai 97,8 persen. Selanjutnya, angka GER wanita untuk Sekolah Dasar, SMTP dan SMTA pada tahun 1993 masing-masing tercatat 107,1; 89,1 dan 63,1 persen, kemudian pada tahun 1995 angka GER wanita turun menjadi 99,2 untuk Sekolah Dasar dan 62,7 persen untuk SMTA, sedangkan GER untuk SMTP naik menjadi 93,2 persen. Penurunan GER untuk Sekolah Dasar dan SMTA pada laki-laki atau wanita menunjukkan bahwa murid yang tertampung di Sekolah Dasar atau SMTA semakin berkurang dengan adanya fasilitas pendidikan yang semakin memadai. Sebaliknya, GER untuk SMTP mengalami kenaikan hal ini diduga adanya pencanangan program wajib pendidikan dasar 9 tahun, sehingga proporsi anak yang masih sekolah di SMTP lebih besar dari tahun sebelumnya.

3.3. Tingkat Pendidikan.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa tingkat pendidikan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka seseorang akan dapat lebih mudah mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan menyerap kemajuan teknologi. Sebagai sumber daya manusia yang berkualitas, maka tamatan pendidikan tinggi diharapkan akan meningkatkan produktivitasnya sebagai tenaga kerja. Selanjutnya, peningkatan produktivitas seseorang dalam bekerja diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Kemajuan yang dicapai oleh suatu bangsa antara lain sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan penduduknya. Berkaitan dengan hal ini, penting untuk diketahui perkembangan jumlah penduduk DKI Jakarta terutama dari tingkat pendidikan tertinggi yang berhasil ditamatkan.

Dalam kurun waktu tahun 1990-1995, tingkat pendidikan penduduk DKI Jakarta cenderung semakin tinggi, baik menurut jenis kelamin maupun secara umum (lihat Tabel 3.6). Ini ditandai oleh penurunan persentase penduduk yang berpendidikan rendah dan sekaligus peningkatan persentase penduduk yang berpendidikan tinggi. Secara umum, penduduk yang berpendidikan rendah atau maksimal sekolah dasar turun 52 persen tahun 1990 menjadi 45,6 persen pada tahun 1995. Pada kurun waktu yang sama, mereka yang berpendidikan Diploma I/II ke atas mengalami sedikit kenaikan, dari 5,28 persen tahun 1990 menjadi 6,14 persen tahun 1995.

Peningkatan level pendidikan juga terjadi pada setiap jenis kelamin. Namun demikian, proporsi tingkat pendidikan masih lebih menguntungkan bagi laki-laki. Sebagai contoh, persentase penduduk yang berpendidikan rendah tahun 1990 masing-masing tercatat sebesar 45 persen laki-laki dan 58 persen wanita. Selanjutnya, mereka yang berpendidikan tinggi tercatat sebesar 6,76 persen laki-laki dan 3,39 persen wanita pada tahun 1990. Pada tahun 1995, indikator ini masing-masing naik menjadi 8,4 persen laki-laki dan 4,9 persen wanita.

Pada jenjang pendidikan menengah, proporsi penduduk yang tamat sekolah lanjutan pertama maupun lanjutan atas ternyata memperlihatkan kenaikan. Pada tahun

1990, persentase penduduk yang tamat sekolah lanjutan pertama mencapai 18,11 persen pada wanita dan 19,57 persen pada penduduk laki-laki. Pada tahun 1995 persentase yang tamat sekolah lanjutan pertama meningkat menjadi 19,93 persen pada penduduk wanita dan 20,76 persen pada penduduk laki-laki. Kemudian, wanita tamatan SMTA tercatat sebesar sebesar 19,7 persen tahun 1990 dan naik menjadi 23,2 persen tahun 1995, sedangkan penduduk laki-laki angkanya naik dari 28,2 persen tahun 1990 menjadi 31,7 persen pada tahun 1995. Penyebab ini berkaitan dengan tingkat partisipasi sekolah pada pendidikan pertama maupun menengah atas selama kurun waktu tersebut mengalami kenaikan.

3.4. Kemudahan Rumah tangga Memasukkan Anak Sekolah.

Data persepsi masyarakat mengenai tingkat kesejahteraan rumah tangga merupakan informasi penting untuk menggambarkan hasil pembangunan. Perkembangan kemudahan rumah tangga memasukkan anak sekolah merupakan salah satu variabel penting untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk. Perkembangan kesejahteraan masyarakat terutama bidang pendidikan dapat diperoleh dengan membandingkan variabel yang sama dari suatu hasil survei.

Persepsi rumah tangga tentang kemudahan memasukkan anak sekolah ke SD, SMTP dan SMTA selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 3.7. Kemudahan memasukkan anak ke sekolah yang dimaksud adalah kemudahan menyekolahkan anak dilihat dari kondisi ekonomi dan non ekonomi seperti biaya sekolah terjangkau, jarak ke sekolah relatif dekat dan prosedur penerimaan mudah.

Tabel 3.7 menunjukkan bahwa persepsi rumah tangga tentang kemudahan menyekolahkan anak baik di SD, SMTP maupun SMTA sebagian besar menyatakan "sama baik" selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 1994, rumah tangga yang menyatakan jawaban "sama baik" dalam kemudahan menyekolahkan anak SD tercatat sebesar 67 persen. Kemudian, sebesar 71 persen rumah tangga menyatakan jawaban "sama baik" dalam kemudahan menyekolahkan anak baik di SMTP maupun SMTA. Besarnya pernyataan "sama baik" itu kemungkinan berkaitan erat dengan kondisi

perekonomian rumahtangga. Sebagai contoh biaya sekolah yang mahal bukan merupakan masalah bagi keluarga yang mapan ekonominya. Selain itu, sistem penyelenggaraan penerimaan sekolah yang baik juga berpengaruh pada persepsi rumahtangga dalam kemudahan menyekolahkan anaknya. Selanjutnya, persepsi rumahtangga yang menyatakan "lebih baik" dalam kemudahan menyekolahkan anak selama tiga tahun terakhir masing-masing sebesar 27, 22 dan 20 persen untuk SD, SMTP, dan SMTA. Persepsi rumahtangga dalam kemudahan menyekolahkan anak ke SD, SMTP dan SMTA tercatat tidak kurang dari 2 persen menyatakan "jauh lebih baik" dan yang menyatakan sama buruk tercatat 2, 3 dan 6 persen untuk menyekolahkan anak masing-masing ke SD, SMTP dan SMTA. Persepsi "lebih buruk" dan "jauh lebih buruk" kurang dari satu persen, yang dialami oleh rumahtangga dalam kemudahan menyekolahkan anaknya.

Tabel 3.1. Tingkat buta huruf menurut golongan umur dan jenis kelamin di DKI Jakarta, Tahun 1990 dan 1995.

Golongan Umur	1990			1995		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
10 - 14	0,39	0,61	0,50	0,57	1,03	0,80
15 - 19	0,51	0,98	0,77	0,15	0,35	0,26
20 - 24	0,52	1,92	1,25	0,33	0,47	0,40
25 - 29	1,06	3,79	2,39	0,49	1,66	1,07
30 - 34	1,43	5,12	3,20	0,43	3,74	2,07
35 - 39	1,61	5,91	3,61	1,71	4,95	3,33
40 - 44	2,30	9,95	5,99	1,65	5,74	3,62
Buta huruf usia						
10 - 44 tahun	0,96	3,13	2,05	0,65	2,00	1,36

Sumber: - Kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta, Penduduk DKI Jakarta, Hasil Sensus Penduduk 1990, Pencacahan Sample, Februari 1992.
- Susenas 1995, BPS, Jakarta.



Tabel 3.2. Tingkat buta huruf Penduduk 10 tahun ke atas menurut Kotamadya dan jenis kelamin di DKI Jakarta, Tahun 1990 dan 1995.

Kotamadya	1990			1995		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Jakarta Selatan	1,54	4,85	3,18	1,16	4,76	2,95
Jakarta Timur	2,02	5,65	3,81	1,10	5,11	3,14
Jakarta Pusat	1,34	5,81	5,59	0,65	4,76	2,72
Jakarta Barat	2,43	7,48	4,98	1,88	5,73	3,82
Jakarta Utara	2,23	7,27	4,76	1,46	5,02	3,25
DKI Jakarta	1,94	6,16	4,04	1,31	5,13	3,23

Sumber: - Kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta, Penduduk DKI Jakarta, Hasil Sensus Penduduk 1990, Pencacahan Sample, Februari 1992.
- Susenas 1995, BPS, Jakarta.

Tabel 3.3. Tingkat partisipasi Sekolah menurut usia Sekolah Dasar, SMTP, SMTA dan Jenis kelamin di DKI Jakarta, Tahun 1990 dan 1995.

Usia Sekolah	1990			1995		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
07 - 12	95,81	95,77	95,79	98,25	97,49	97,88
13 - 15	86,89	75,70	81,07	93,10	87,46	90,22
16 - 18	64,66	50,10	56,71	77,46	61,04	68,47

Sumber: - Kantor Statistik propinsi DKI Jakarta, Penduduk DKI Jakarta, Hasil Sensus Penduduk 1990, Pencacahan Sample, Februari 1992.
- Susenas 1995, BPS, Jakarta.

Tabel 3.4. Tingkat partisipasi Sekolah menurut usia Sekolah Dasar, SMTP, SMTA, Jenis kelamin dan Kotamadya di DKI Jakarta, Tahun 1995.

Usia Sekolah / Jenis Kelamin	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Pusat	Jakarta Barat	Jakarta Utara	Jumlah
7 - 12						
Laki-laki	97,67	99,41	99,01	97,66	97,64	98,25
Perempuan	97,36	97,61	97,78	97,29	97,54	97,49
Laki-laki + Perempuan	97,53	98,51	98,38	97,49	97,59	97,89
13 - 15						
Laki-laki	97,16	92,22	95,72	89,47	92,17	93,10
Perempuan	88,96	92,89	89,13	82,22	83,42	87,46
Laki-laki + Perempuan	93,22	92,57	92,45	85,75	87,47	90,22
16 - 18						
Laki-laki	79,00	80,95	80,11	69,27	80,43	77,46
Perempuan	56,97	65,71	69,63	59,17	57,33	61,04
Laki-laki + Perempuan	67,39	71,91	74,73	63,90	67,73	68,47

Sumber: Susenas 1995, BPS, Jakarta.

Tabel 3.5. Angka partisipasi Sekolah (GER) Sekolah Dasar, SMTP, SMTA dan Jenis kelamin di DKI Jakarta, Tahun 1990 dan 1995.

Tingkat Pendidikan	1990			1995		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Sekolah Dasar	109,7	107,1	108,4	102,0	99,2	100,6
SMTP	95,0	89,1	92,1	97,8	93,2	95,5
SMTA	83,2	63,1	72,6	82,5	62,7	71,7

Sumber: Susenas 1993-1995, BPS, Jakarta.

Tabel 3.6. Distribusi persentase Penduduk 10 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi dan jenis kelamin di DKI Jakarta, Tahun 1990 dan 1995.

Tingkat Pendidikan	1990			1995		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/Belum pernah Sekolah	2,44	7,60	5,01	1,32	5,19	3,27
Tidak/Belum tamad SD	16,16	20,38	18,27	13,57	16,81	15,20
Sekolah Dasar	26,86	30,43	28,64	24,23	30,00	27,13
SMTP Umum	18,75	17,37	18,06	18,99	18,08	18,53
SMTP Kejuruan	0,82	0,74	0,78	1,77	1,85	1,85
SMTA Umum	19,71	13,43	16,58	19,90	14,52	17,20
SMTA Kejuruan	8,48	6,25	7,37	11,83	8,64	10,23
Diploma I/Diploma II	0,45	0,37	0,41	0,98	0,76	0,37
Diploma III/Akademi	2,47	1,73	2,10	3,11	2,19	2,65
Universitas	3,84	1,69	2,77	4,30	1,95	3,12
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: - Kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta, Penduduk DKI Jakarta, Hasil Sensus Penduduk 1990, Pencacahan Sample, Februari 1992.
- Susenas 1995, BPS, Jakarta.

Tabel 3.7. Distribusi persentase rumahtangga menurut perkembangan kemudahan memasukkan anak ke SD, SMTP dan SMTA selama tiga tahun terakhir di DKI Jakarta, Tahun 1994.

Persepsi Rumahtangga	Tingkat Pendidikan		
	Sekolah Dasar	SMTP	SMTA
Jauh lebih baik	2,58	2,46	2,15
Lebih baik	27,40	22,44	19,95
Sama baik	66,97	70,87	71,11
Sama buruk	2,34	3,54	5,88
Lebih buruk	0,66	0,61	0,83
Jauh lebih buruk	0,06	0,08	0,08
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Statistik kesejahteraan Rumahtangga 1994, BPS, Jakarta.

BAB IV KETENAGAKERJAAN

4.1. Penduduk menurut jenis kegiatan

Kegiatan penduduk berumur 10 tahun ke atas (usia kerja) terdiri dari penduduk bekerja, mencari pekerjaan, sekolah, mengurus rumahtangga dan kegiatan lainnya yang dilakukan selama seminggu sebelum pencacahan. Dari kegiatan tersebut, penduduk yang aktif secara ekonomi yaitu mereka yang melakukan kegiatan bekerja dan mencari pekerjaan digolongkan ke dalam angkatan kerja. Sedangkan penduduk yang tidak aktif secara ekonomi yaitu mereka yang melakukan kegiatan sekolah, mengurus rumahtangga dan lainnya digolongkan ke dalam bukan angkatan kerja.

Pada tahun 1990, persentase angkatan kerja terhadap penduduk berumur 10 tahun ke atas atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mencapai 47 persen terdiri dari 42 persen penduduk bekerja dan 5 persen pencari kerja. Pada tahun 1995, TPAK mencapai 50 persen dengan rincian 44 persen penduduk bekerja dan 6 persen pencari kerja (Tabel 4.1). Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (1990-1995) TPAK mengalami kenaikan sebesar 3 persen.

Peningkatan persentase angkatan kerja diiringi dengan penurunan persentase bukan angkatan kerja. Pada tahun 1990, sebesar 53 persen penduduk DKI Jakarta melakukan kegiatan yang tidak aktif secara ekonomi yang terdiri dari 28 persen penduduk yang bersekolah, 21 persen mengurus rumahtangga dan 4 persen tergolong pada kegiatan lainnya seperti pensiunan, cacat dan lainnya. Pada tahun 1995, terjadi penurunan persentase penduduk bukan angkatan kerja menjadi 50 persen, yang terdiri dari: penduduk yang bersekolah sekitar 25 persen, mengurus rumahtangga sekitar 20 persen dan kegiatan lainnya sekitar 6 persen. Penurunan persentase penduduk yang bersekolah dan mengurus rumahtangga diduga sebagian dari mereka masuk ke angkatan kerja.

Bila dilihat per jenis kelamin dalam periode lima tahun terakhir (1990-1995), pertumbuhan angkatan kerja perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki, yaitu 4,44 persen rata-rata per tahun untuk perempuan dan 2,76 persen rata-rata per

tahun untuk laki-laki. Hal sama juga terjadi pada pertumbuhan penduduk bekerja, yaitu 3,12 persen rata-rata per tahun untuk perempuan dan 2,07 persen rata-rata per tahun untuk laki-laki. Pertumbuhan angkatan kerja dan penduduk bekerja perempuan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki dapat dipahami, mengingat kondisi daerah perkotaan semakin memungkinkan kesempatan kerja terbuka lebih luas bagi wanita seperti pramuniaga dan pekerja wanita di pabrik. Selain itu, tingkat pendidikan perempuan di kota-kota besar seperti Jakarta semakin tinggi sehingga memperbesar kemungkinan mereka untuk mengisi lowongan pekerjaan yang mungkin selama ini lebih banyak diisi oleh calon pekerja laki-laki. Selanjutnya, diduga karena tekanan ekonomi yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak ibu-ibu yang masuk ke angkatan kerja untuk menopang ekonomi rumahtangga. Hal lain yang mendorong ibu-ibu rumahtangga masuk angkatan kerja (bekerja dan mencari pekerjaan) adalah akibat keberhasilan Keluarga Berencana, anak-anak mereka relatif sedikit dan sudah cukup besar, sehingga banyak waktu luang dan itu dimanfaatkan untuk menambah penghasilan (lihat Tabel 4.2).

Jumlah angkatan kerja yang terus meningkat merupakan salah satu dampak dari laju pertumbuhan penduduk usia 10 tahun ke atas yang masih relatif tinggi. Peningkatan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan antara lain oleh lowongan kerja akan memacu jumlah pengangguran di DKI Jakarta. Langkah-langkah antisipatif yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan antara lain menurunkan laju pertumbuhan penduduk dan membuka lapangan usaha baru dengan cara menggalakkan iklim investasi serta memberikan bantuan permodalan serta ketrampilan dan managerial bagi pekerja informal (Tabel 4.2).

4.2 Penduduk Bekerja

Tabel 4.3 memperlihatkan jenis pekerjaan yang banyak ditekuni oleh pekerja di DKI Jakarta. Jenis pekerjaan yang banyak digeluti adalah tenaga produksi, operator dan tenaga kasar, kemudian disusul oleh tenaga usaha penjualan. Persentase yang tinggi dari tenaga produksi, operator dan tenaga kasar memperlihatkan bahwa peran

DKI Jakarta sebagai salah satu sentra industri dan penyerap tenaga kasar tidak kecil. Dalam kurun waktu 1990-1995, persentase pekerja yang bergelut sebagai tenaga produksi, operator dan tenaga kasar mengalami penurunan, dari 33,9 persen pada tahun 1990 turun menjadi 29,5 persen pada tahun 1995 dan sebaliknya persentase tenaga usaha penjualan mengalami peningkatan, dari 22,7 persen pada tahun 1990 naik menjadi 27,0 persen pada tahun 1995. Meningkatnya pekerja yang bergelut sebagai tenaga usaha penjualan, seiring dengan meningkatnya pusat-pusat pertokoan dan perbelanjaan yang semakin menjamur di DKI Jakarta yang menyerap banyak tenaga kerja khususnya di bidang penjualan sebagai pramuniaga. Sedangkan pekerja yang bekerja sebagai tenaga usaha pertanian paling sedikit yaitu sekitar satu persen. Hal ini karena jenis pekerjaan usaha pertanian semakin menurun, seiring dengan semakin mengecilnya lahan pertanian. Jenis pekerjaan lain yang banyak digeluti adalah pekerjaan administrasi atau tata usaha. Jenis pekerjaan inipun mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir, dari 17,2 persen pada tahun 1990 menjadi 19,0 persen pada tahun 1995. Jenis pekerjaan ini merupakan jenis pekerjaan yang menjadi tulang-punggung di hampir semua sektor usaha.

Sebaran penduduk bekerja menurut status pekerjaan selama lima tahun terakhir (1990-1995) pada Tabel 4.4 tidak memperlihatkan perubahan yang cukup besar kecuali berstatus buruh/karyawan. Pada tahun 1990 tercatat sekitar 72,0 persen dan pada tahun 1995 turun menjadi sekitar 63,0 persen dan sebaliknya mereka yang berstatus sebagai majikan apakah tanpa buruh ataupun dengan buruh naik dari sekitar 25,0 persen pada tahun 1990 menjadi sekitar 32,0 persen pada tahun 1995. Ini menandakan bahwa pola penduduk bekerja menurut status cenderung bergeser dari status buruh (employee atau paid worker) ke status majikan (employer). Terjadinya pergeseran tersebut mungkin disebabkan oleh iklim berusaha yang semakin baik.

Komposisi penduduk bekerja menurut pendidikan selama lima tahun terakhir (1990-1995) seperti yang tercantum pada Tabel 4.5 memperlihatkan kecenderungan peningkatan. Mereka yang berpendidikan rendah atau maksimum tamat Sekolah Dasar yang semula tercatat sekitar 43,0 persen tahun 1990, kemudian turun menjadi sekitar 34,0 persen tahun 1995. Sebaliknya pekerja dengan tingkat pendidikan

menengah atau tinggi mengalami kenaikan. Komposisi pendidikan menengah ini menanjak naik dari sekitar 48,0 persen menjadi sekitar 56,0 persen. Sedangkan pekerja dengan pendidikan diploma atau universitas juga mengalami kenaikan dari sekitar 9,0 persen menjadi 10,0 persen. Oleh karena itu, peningkatan pendidikan penduduk bekerja itu cenderung memperketat persaingan dalam mencari pekerjaan di pasar tenaga kerja.

4.3 Pengangguran

Dalam penelitian-penelitian kependudukan yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik, pengangguran adalah mereka yang mencari pekerjaan dan tidak punya pekerjaan. Mereka bukan hanya pencari kerja formal, misalnya dengan mendaftarkan diri ke Kantor Departemen Tenaga Kerja, tetapi juga mencari kerja informal. Angka pengangguran didefinisikan sebagai proporsi mereka yang mencari pekerjaan terhadap angkatan kerja. Di DKI Jakarta, tingkat pengangguran selama kurun waktu 1990-1995 menunjukkan gejala peningkatan, Jika pada tahun 1990 tingkat pengangguran masih satu digit yaitu sekitar 7,15 persen, maka sejak tahun 1993 tingkat pengangguran telah memasuki angka dua digit yaitu 10,31 persen dan pada tahun 1995 angka pengangguran telah mencapai 11,24 persen (Tabel 4.6).

Tingkat pengangguran wanita jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pengangguran laki-laki. Angka pengangguran laki-laki masih dibawah dua digit yaitu 9,60 persen pada tahun 1995. Sedangkan angka pengangguran wanita sudah mencapai dua digit sejak tahun 1993 dan pada tahun 1995 angka pengangguran wanita sekitar 15,0 persen.

Ada beberapa dugaan yang memungkinkan angka pengangguran yang tinggi penduduk wanita, antara lain jumlah wanita yang memasuki angkatan kerja semakin dan lebih besar dari laki-laki. Dengan kondisi pendidikan yang relatif lebih rendah, wanita menghadapi persaingan yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki dalam mendapatkan suatu pekerjaan. Seperti yang telah disebutkan dibagian terdahulu bahwa masuknya wanita ke angkatan kerja selain karena tingkat pendidikan wanita semakin meningkat juga karena tuntutan ekonomi keluarga.

Pola pengangguran menurut golongan umur menunjukkan bahwa peningkatan pengangguran terjadi pada setiap golongan umur. Dalam lima tahun terakhir (1990-1995) angka pengangguran umur muda antara usia 10-24 tahun relatif tinggi dan semakin tinggi. Jika angka pengangguran kelompok umur ini tahun 1990 masih sekitar 17,0 persen maka lima tahun kemudian angkanya naik menjadi di atas 30,0 persen. Diantara golongan umur muda, ternyata pengangguran usia 10-19 tahun menempati urutan yang paling tinggi diantara semua kelompok umur. Peningkatan pengangguran yang sangat tinggi pada anak usia 10-19 tahun ini diduga sebagian besar berasal dari mereka yang belum pernah bekerja sebelumnya (*new entrants*). Hal ini antara lain refleksi dari tekanan ekonomi yang semakin berat bagi golongan penduduk atau keluarga tertentu sehingga pendidikan anak-anak mereka terlantar, terutama pendatang dari luar DKI Jakarta yang di daerah asalnya tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dan sulit mendapatkan pekerjaan di daerah asalnya.

Dalam kurun waktu lima tahun (1990-1995) angka pengangguran usia tua (50 tahun keatas) juga mengalami kenaikan walaupun relatif kecil. Pada tahun 1990 angka pengangguran pada kelompok usia ini sekitar satu persen, naik menjadi sekitar dua persen pada tahun 1995. Kenaikan pengangguran pada kelompok usia ini mungkin disebabkan oleh meningkatnya mereka yang sudah memasuki masa pensiun yang berusaha mencari pekerjaan baik karena tekanan ekonomi rumahtangga maupun karena hal lain. Disamping itu, kesempatan kerja relatif masuk cukup terbuka bagi kelompok usia tua terutama pekerjaan sektor informal dimana faktor umur tidak terlalu menjadi kendala.

Tabel 4.1. Persentase penduduk usia 10 tahun keatas menurut jenis kegiatan, di DKI Jakarta, tahun 1990, 1993 dan 1995.

Jenis Kegiatan	1990	1993	1995
Angkatan Kerja	46,67	49,28	49,96
- Bekerja	41,90	44,20	44,34
- Mencari Pekerjaan	4,77	5,08	5,62
Bukan Angkatan Kerja	53,33	50,72	50,04
- Sekolah	27,92	26,24	24,77
- Mengurus Rumah tangga	20,99	19,62	19,57
- Lainnya	4,42	4,86	5,69
Jumlah	100,00	100,00	100,00
	6.486.861	7.128.556	7.472.990

Sumber: - Penduduk DKI Jakarta, Hasil Sensus Penduduk 1990 pencacahan sampel, Kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta.
 - Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 1993-1995, Biro Pusat Statistik, Jakarta.

Tabel 4.2. Pertumbuhan angkatan kerja dan penduduk bekerja, DKI Jakarta, tahun 1990-1995.

Indikator	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
Penduduk Usia 10 tahun ke atas			
1980 - 1990 (% per Tahun)	3,25	3,37	3,31
1990 - 1995 (% per Tahun)	2,91	3,25	3,08
Angkatan Kerja			
1980 - 1990 (% per Tahun)	3,93	6,48	4,68
1990 - 1995 (% per Tahun)	2,76	4,44	3,41
Penduduk Bekerja			
1980 - 1990 (% per Tahun)	3,63	5,95	4,27
1990 - 1995 (% per Tahun)	2,07	3,12	2,48

Sumber: - Penduduk DKI Jakarta, Hasil Sensus Penduduk 1980 seri S no.11, BPS, Jakarta.
 - Penduduk DKI Jakarta, Hasil Sensus Penduduk 1990 Pencacahan Sample, Kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta.
 - Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 1993-1995, BPS, Jakarta.

Tabel 4.3. Persentase Penduduk bekerja menurut jenis pekerjaan, DKI Jakarta, tahun 1990 -1995.

Jenis Pekerjaan	1990	1993	1994	1995
Tenaga Profesional dan Teknisi	6,7	4,8	4,9	4,8
Kepemimpinan dan Tatalaksana	1,6	1,1	2,4	1,6
Tata Usaha	17,2	18,2	18,4	19,4
Usaha Penjualan	22,7	26,0	26,0	27,0
Usaha Jasa	16,4	16,9	16,6	14,5
Usaha Pertanian	1,1	1,0	1,9	1,4
Produksi dan Operator/Tenaga Kasar	33,9	30,3	28,5	29,5
Lainnya	0,4	1,7	1,3	1,8
Jumlah persentase Pekerja	100,00	100,00	100,00	100,00
	2.931.917	3.150.427	3.164.722	3.313.887

Sumber: - Penduduk DKI Jakarta, Hasil Sensus Penduduk 1990 Pencacahan Sample, Kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta.
 - Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 1993-1995, Biro Pusat Statistik, Jakarta.

Tabel 4.4. Persentase penduduk bekerja menurut status pekerjaan, DKI Jakarta, tahun 1990-1995.

Status Pekerjaan	1990	1993	1994	1995
Berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain	14,9	18,9	18,3	18,6
Berusaha dengan bantuan ART/buruh tidak tetap	7,9	9,8	10,6	10,2
Berusaha dengan buruh tetap	1,8	2,0	3,0	3,2
Buruh / Karyawan	72,2	64,7	63,1	62,7
Pekerjaan Keluarga	3,2	4,6	5,0	5,3
Jumlah Persentase Pekerja	100,00	100,0	100,0	100,0
	2.931.917	3.150.427	3.164.722	3.313.887

Sumber: - Penduduk DKI Jakarta, Hasil Sensus Penduduk 1990, Pencacahan Sample, Kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta
 - Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 1993-1995, Biro Pusat Statistik, Jakarta.

Tabel 4.5. Persentase penduduk bekerja menurut pendidikan di DKI Jakarta, tahun 1990-1995.

Pendidikan	1990	1993	1994	1995
Tidak pernah Sekolah	3,9	2,7	2,4	2,2
Tidak/Belum tamad SD	12,1	10,3	8,8	8,2
Sekolah Dasar	27,3	23,6	23,0	24,0
SLTP Umum	15,3	15,8	15,3	15,7
SLTP Kejuruan	0,9	2,0	1,8	1,9
SLTA Umum	19,8	21,1	21,9	21,1
SLTA Kejuruan	11,3	13,3	13,7	15,6
D.I / D.II	0,7	1,5	1,8	1,2
Akademi / D.III	3,6	4,0	4,2	4,4
Universitas / D.IV	5,1	5,6	7,1	5,7
Jumlah persentase pekerja	100,00	100,00	100,00	100,00
	3.931.917	3.150.427	3.164.722	3.331.887

Sumber: - Penduduk DKI Jakarta, Hasil Sensus Penduduk 1990, Pencacahan Sample, Kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta.
 - Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 1993-1995, Biro Pusat Statistik.

Tabel 4.6. Angka pengangguran menurut jenis kelamin di DKI Jakarta, tahun 1990-1995.

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
1990	6,30	8,93	7,15
1993	8,91	13,10	10,31
1994	9,30	15,10	11,20
1995	9,54	14,71	11,24

Sumber: - Penduduk DKI Jakarta, Hasil Sensus Penduduk 1990, Pencacahan Sample, Kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta.
 - Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 1993-1995, Biro Pusat Statistik, Jakarta.

Tabel 4.7. Persentase angka pengangguran menurut golongan umur di DKI Jakarta, tahun 1990, 1993 dan 1995

Golongan Umur	1990	1993	1995
10 - 14	17,91	29,34	47,61
15 - 19	16,72	25,45	28,23
20 - 24	16,44	29,36	25,12
25 - 29	6,49	9,76	13,36
30 - 34	2,52	3,07	4,93
35 - 39	1,44	1,64	2,38
40 - 44	0,99	0,98	1,16
45 - 49	1,00	0,46	1,34
50 +	0,98	1,06	1,89
DKI Jakarta	7,15	10,31	11,24

Sumber: - Penduduk DKI Jakarta, Hasil Sensus Penduduk 1990, Pencacahan sample, Kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta.
 - Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 1993-1995, Biro Pusat Statistik, Jakarta.

BAB V KESEHATAN

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk mencapai kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memperoleh pelayanan kesehatan secara murah, mudah dan merata. Suatu masyarakat yang memiliki derajat kesehatan yang tinggi, maka dinilai semakin berhasil pula dalam melaksanakan pembangunan sesuai yang diharapkan.

Dalam Repelita VI ini, program pembangunan Pemerintah Daerah DKI Jakarta masih memperhatikan sektor kesehatan antara lain upaya peningkatan dan penyempurnaan baik sarana maupun prasarana kesehatan, upaya kesehatan ibu dan anak melalui imunisasi, dan berbagai upaya lainnya. Upaya pemerintah dalam menangani bidang kesehatan tampaknya sudah menunjukkan hasil-hasil yang diharapkan. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan angka kematian bayi dan balita, peningkatan angka harapan hidup, peningkatan kesehatan ibu dan anak serta peningkatan gizi balita.

5.1. Angka Kematian bayi dan balita serta angka harapan hidup.

Indikator kependudukan yang sering dipakai untuk mengukur kemajuan suatu masyarakat khususnya derajat kesehatan adalah angka kematian bayi dan balita, serta angka harapan hidup. Ketiga indikator tersebut berkaitan erat dengan tingkat pendidikan keluarga, keadaan sosial ekonomi, kebersihan lingkungan dan pelayanan kesehatan yang tersedia.

Mengingat terbatasnya data yang tersedia, data yang disajikan hanya angka kematian bayi dan balita saja. Pada Tabel 5.1. terlihat bahwa berdasarkan hasil survei, angka kematian bayi terus mengalami penurunan, pada tahun 1980 angka kematian bayi tercatat sebesar 82,0 tiap 1000 kelahiran dengan rincian angka kematian bayi laki-laki 88,7 tiap 1000 kelahiran bayi laki-laki dan 73,0 angka kematian bayi perempuan

dari 1000 kelahiran bayi perempuan. Pada tahun 1995 mengalami penurunan lebih dari separuhnya yaitu mencapai 30,0 tiap 1000 kelahiran dengan rincian angka kematian bayi laki-laki 34,0 tiap 1000 kelahiran bayi laki-laki dan 26,0 tiap 1000 kelahiran bayi perempuan. Demikian pula halnya dengan angka kematian balita dari 119,0 tiap 1000 kelahiran balita pada tahun 1980 menjadi 36,7 tiap 1000 kelahiran balita pada tahun 1994 (data tahun 1995 belum tersedia).

Menurunnya angka kematian bayi ini menandakan makin meningkatnya pelayanan di bidang kesehatan seperti pelayanannya, penyuluhan dan sebagainya. Salah satu pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan ibu hamil seperti pemberian imunisasi tetanus toxoid.

5.2. Pemberian imunisasi ibu hamil dan Anak Balita.

Imunisasi merupakan upaya pemeliharaan kesehatan yang cukup penting karena sifatnya memberi pencegahan terhadap penyakit tertentu. Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 1994 di Jakarta secara keseluruhan ibu hamil yang mendapatkan imunisasi toxoid minimal sekali mengalami peningkatan dari 67 persen pada tahun 1991 menjadi 74 persen pada tahun 1994. Sebetulnya cakupan imunisasi tersebut belum maksimal diduga karena banyak ibu/wanita pendatang dari luar DKI Jakarta yang berpendidikan rendah dan mereka belum mengetahui manfaatnya bahkan mungkin belum pernah mendengar imunisasi, khususnya terhadap ibu hamil. meningkatnya pemberian imunisasi tetanus toxoid merupakan salah satu penyebab menurunnya angka kematian bayi, demikian pula angka kematian balita (lihat Tabel 5.1).

Disamping itu imunisasi yang diberikan kepada bayi dan balita serta peningkatan gizi balita yang diberikan baik oleh tenaga medis maupun ibu-ibunya, juga faktor-faktor lain cukup mempengaruhi. Seperti terlihat pada Tabel 5.2 hampir 75 persen ibu-ibu mereka yang mendapat suntikan tetanus toxoid (TT) bagi yang melahirkan lima tahun sebelum survei. Dari sekitar 75 persen tersebut lebih dari 56 persen diantaranya yang pernah mendapatkan suntikan TT sebanyak dua kali (Tabel 5.2). Selanjutnya, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa menurunnya

kematian balita salah satunya disebabkan oleh imunisasi balita, hal ini ditunjukkan oleh Tabel 5.3 bahwa lebih dari 90 persen balita pada tahun 1995 pernah mendapatkan imunisasi dan bahkan sekitar 8,1 persen diantaranya sebetulnya mempunyai kartu imunisasi.

5.3. Gizi balita.

Demikian pula halnya dengan kecukupan gizi balita, ini juga merupakan salah satu penyebab menurunnya angka kematian balita. Pada tabel 5.4 terlihat bahwa balita yang mempunyai status gizi baik terus meningkat, pada tahun 1993 hampir seluruh balita mempunyai status gizi baik dan sedang, hanya sebagian kecil saja balita yang mempunyai status gizi kurang dan buruk yaitu sekitar 3 persen. Meningkatnya status gizi balita tersebut adalah salah satu indikator meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk Jakarta. Dengan meningkatnya tingkat kesejahteraan tersebut semakin pedulinya masyarakat Jakarta terhadap kesehatan keluarga dan anaknya.

5.4. Pemberian Air Susu Ibu (ASI)

Pemberian Air Susu Ibu (ASI) adalah salah satu yang membuat anak menjadi cerdas, kebal terhadap penyakit dan hal lainnya yang penting untuk pertumbuhan anak. Semakin gencarnya penerangan mengenai pentingnya pemakaian ASI semakin meningkat pula ibu-ibu yang memberikan ASI-nya terhadap anaknya, hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.5 persentase balita yang tidak diberikan ASI terus mengalami penurunan. Pada tahun 1995 hanya 3,6 persen dari 718.743 anak balita tidak mendapat ASI. Lamanya menyusui ternyata cukup bervariasi, yang paling banyak adalah disusui kurang dari setahun sekitar 30 persen, satu hingga satu setengah tahun 26,71 persen, satu setengah sampai dua tahun 13,92 persen dan yang lebih dari dua tahun masih cukup tinggi yaitu sekitar 25,92 persen. Jika dibandingkan tahun 1994 ternyata balita yang tidak disusui mengalami penurunan. Demikian pula yang disusui satu tahun sampai satu setengah tahun turun sekitar dua angka, sebaliknya untuk yang disusui antara 0-11 bulan mengalami kenaikan sekitar tiga angka, demikian pula yang disusui lebih dari dua tahun naik sekitar satu angka. Lamanya menyusui dua

tahun atau lebih tersebut mungkin dilakukan oleh ibu-ibu rumahtangga yang tidak bekerja, sehingga cukup banyak waktu untuk menyusui anaknya. Selanjutnya balita yang disusui selma 18-23 bulan tampaknya relatif tidak mengalami perubahan. Lamanya balita yang disusui akan berdampak baik bagi perkembangan fisik balita, juga dalam upaya peningkatan kesehatan dan ketahanan tubuh bayi terhadap berbagai penyakit.

Disamping itu, indikator ini sangat membantu dalam menjarangkan kelahiran bayi berikutnya. Dengan demikian potensi penurunan angka kelahiran disertai rata-rata lamanya menyusui diharapkan semakin bisa diwujudkan. Namun demikian, tingkat dan waktu penggunaan ASI oleh bayi sering berbenturan dengan kondisi sosial ekonomi dan kegiatan ibu yang bersangkutan. Karena kesibukan sehari-hari terutama yang bekerja jauh dari rumah, kualitas dan intensitas menyusui oleh ibu-ibu di perkotaan terutama DKI Jakarta terhadap bayinya cenderung memperkecil lama menyusui.

Dari rata-rata lamanya balita disusui pada tahun 1995 sekitar 3,76 bulan disusui tanpa makanan tambahan atau disebut dengan ASI eksklusif berarti mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 1994 yang rata-ratanya 4,21 bulan dan 11,49 bulan disusui disertai makanan tambahan (Tabel 5.6).

5.5. Penolong Kelahiran.

Langkah-langkah Pemerintah Daerah DKI Jakarta dalam melaksanakan dan mengembangkan upaya kesehatan masyarakat antara lain ditujukan untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Penyediaan sarana kesehatan berupa tempat pemeriksaan kehamilan merupakan kebutuhan pokok dalam pelayanan kesehatan khususnya perawatan ibu hamil. Perawatan ibu hamil dalam hal ini adalah pemeriksaan kandungan yang dilakukan oleh dokter atau bidan di rumah sakit atau klinik swasta.

Selanjutnya disamping tempat pemeriksaan kehamilan tidak kalah pentingnya adalah penolong persalinan, karena hal itu untuk menjamin keselamatan ibu yang melahirkan maupun bayi itu sendiri. Secara umum, persalinan yang dibantu oleh

dokter, bidan atau medis lainnya lebih aman bila dibandingkan dengan persalinan yang dibantu oleh dukun, atau tenaga medis lain. Tinggi rendahnya pemanfaatan fasilitas penolong persalinan media berkaitan penting dalam usaha menurunkan angka kematian bayi. Pada tabel 5.7 terlihat bahwa pada tahun 1995 persentase penolong kelahiran lebih dari 90 persen adalah tenaga medis dengan rincian yang ditolong dokter 20,08 persen, bidan 70,64 persen dan tenaga medis lainnya 0,87 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 1994, kelahiran yang ditolong oleh dokter mengalami penurunan dari sekitar 25 persen menjadi sekitar 20 persen, namun sebaliknya yang ditolong oleh dokter mulai bergeser ke bidan. Hal tersebut terjadi karena selain biaya persalinan oleh bidan relatif lebih murah juga tenaga kesehatan relatif cukup memadai. Disamping peralatan yang makin berkembang, tempat praktek bidan menyediakan tempat untuk melahirkan sehingga tidak perlu ke rumah sakit kecuali kalau ada hal-hal darurat.

Selanjutnya penolong persalinan oleh tenaga non medis tampak masih belum dapat dihapus sama sekali meskipun di daerah perkotaan. Keberadaan dukun bayi sebagai penolong persalinan masih diminati meskipun persentasenya kecil yaitu sekitar 9 persen pada tahun 1994 dan turun drastis pada tahun 1995 menjadi delapan persen. Juga, persalinan yang ditolong famili atau lainnya masing-masing hanya 0,29 persen dan 0,03 persen pada tahun 1995. Masih adanya persalinan yang ditolong oleh dukun diduga bayi yang ditolong oleh dukun banyak yang dilahirkan oleh ibu yang menjadi pendatang di DKI Jakarta.

**Tabel 5.1. Angka kematian Bayi dan angka kematian Balita
di DKI Jakarta, Tahun 1980 - 1995**

Ukuran/Jenis Kelamin	1) 1980	1) 1990	2) 1991	3) 1993	3) 1994	3) 1995
1. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran						
Laki-laki	88,7	-	-	37,0	36,0	34,0
Perempuan	73,0	-	-	28,0	27,0	26,0
Laki-laki + Perempuan	82,0	40,0	37,0	32,0	31,0	30,0
2. Angka kematian balita per 1000 kelahiran						
Laki-laki + Perempuan	119,0	57,0	59,9	-	36,7	-

Sumber: 1. Indikator Kesejahteraan Anak 1994, BPS, Jakarta.

2. SDKI 1991, 1994, BPS, Jakarta.

3. Estimasi Parameter demografi, Biro Statistik Demografi dan Ketenagakerjaan, BPS, Jakarta.

Tabel 5.2. Distribusi persentase kelahiran selama lima tahun sebelum survei yang ibu mereka mendapat suntikan tetanus toxoid (TT) dan persentase dari ibu yang ketika hamil mendapat kartu imunisasi (KMS) menurut Kotamadya di DKI Jakarta, Tahun 1994.

Kotamadya	Jumlah suntikan Tetanus Toxoid (TT)				Jumlah Imunisasi (KMS)
	0	1	2	3 +	
Jakarta Selatan	25,4	74,6	61,3	6,2	60,4
Jakarta Timur	18,0	82,0	61,1	6,8	56,9
Jakarta Pusat	21,4	78,6	55,0	5,7	57,3
Jakarta Barat	25,7	74,3	56,1	5,5	48,9
Jakarta Utara	29,0	71,0	50,3	9,3	59,9
DKI Jakarta	25,5	74,5	55,9	6,7	59,6

Sumber: Keadaan Demografi dan Kesehatan rumahtangga DKI Jakarta, 1994 Kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta

Tabel 5.3. Distribusi persentase Balita yang pernah/tidak pernah mendapat imunisasi menurut Kotamadya di DKI Jakarta, Tahun 1993-1995.

Kotamadya	Pernah Imunisasi				Jumlah	
	Ya	Tidak			%	PERKIRAAN JUMLAH BALITA
		Ada kartu	Tidak ada Kartu	TT		
Jakarta Selatan						
1993	94,3	2,1	3,6	-	100,00	150.232
1994	91,3	4,5	4,0	-	100,00	131.480
1995	93,9	4,2	1,9	-	100,00	159.720
Jakarta Timur						
1993	86,6	9,2	4,2	-	100,00	165.624
1994	91,7	5,5	2,7	-	100,00	180.600
1995	92,1	1,1	6,8	-	100,00	201.200
Jakarta Pusat						
1993	95,9	1,0	3,1	-	100,00	55.872
1994	92,5	5,6	1,6	-	100,00	54.468
1995	93,1	3,7	3,2	-	100,00	63.169
Jakarta Barat						
1993	91,6	1,9	6,3	-	100,00	151.230
1994	88,0	4,3	7,5	0,2	100,00	163.982
1995	90,0	3,0	7,0	-	100,00	160.000
Jakarta Utara						
1993	89,4	3,8	6,6	0,2	100,00	126.496
1994	85,4	6,4	7,3	0,9	100,00	117.720
1995	90,7	3,2	6,1	-	100,00	130.832
Jumlah						
1993	90,9	4,1	5,0	-	100,00	649.454
1994	89,6	5,2	4,9	0,3	100,00	648.250
1995	91,9	2,8	5,3	-	100,00	714.921

Sumber: SUSENAS 1993 - 1995, BPS

Tabel 5.4. Distribusi persentase Balita menurut Status Gizi
DKI Jakarta, Tahun 1985 - 1993.

Tahun	Status Gizi				Jumlah
	Baik	Sedang	Kurang	Buruk	
1985 2)	55,62	38,98	5,09	0,31	100,00
1987 1)	58,07	32,61	7,69	1,63	100,00
1989 1)	55,50	34,89	7,26	2,34	100,00
1992 3)	63,18	28,33	6,12	2,40	100,00
1993 4)	65,75	30,79	3,19	0,27	100,00

Sumber: 1. Profil Statistik Ibu dan Anak di Indonesia tahun 1980 dan 1990, BPS, Jakarta.
2. Status Gizi Balita, Kerjasama Departemen Kesehatan dengan BPS, tahun 1986, BPS, Jakarta.
3. Susenas 1992, BPS, Jakarta.
4. Profil Kesehatan DKI Jakarta 1993, Kanwil Depkes.

Tabel 5.5. Persentase Balita menurut lama disusui
di DKI Jakarta, Tahun 1992 - 1995.

Lama disusui (bulan)	1992	1993	1994	1995
Tidak disusui	4,51	3,96	4,87	3,56
0 - 11	25,82	30,87	27,15	29,89
12 - 17	24,18	32,87	29,26	26,71
18 - 23	15,16	12,33	13,93	13,92
24 +	30,33	19,69	24,76	25,92
Jumlah	100,00 293.776	100,00 649.454	100,00 648.250	100,00 718.743

Sumber: Susenas 1992-1995, BPS, Jakarta.

Tabel 5.6. Rata-rata lama pemberian ASI menurut pemberian makanan pada Balita di DKI Jakarta, Tahun 1993 - 1995.

Diberi Air Susu Ibu (ASI)	Rata-rata (Bulan)		
	1993	1994	1995
Tanpa makanan tambahan	4,03	4,21	3,76
Dengan makanan tambahan	10,28	11,39	11,51

Sumber: Susenas 1993-1995, BPS, Jakarta.

Tabel 5.7. Distribusi persentase Balita menurut Penolong kelahiran di DKI Jakarta, Tahun 1993 - 1995.

Penolong Kelahiran	1993	1994	1995
Dokter	22,14	24,69	20,08
Bidan	67,96	65,03	70,64
Tenaga Medis lain	0,96	0,52	0,87
Dukun	8,78	8,96	8,09
Famili	0,05	0,11	0,29
Lainnya	0,11	0,68	0,03
Jumlah	100,00	100,00	100,00
	649.454	648.250	718.743

Sumber: Susenas 1993 - 1995, BPS, Jakarta.

BAB VI PERUMAHAN

Setidak-tidaknya ada tiga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh manusia agar hidup secara layak yaitu kebutuhan akan pangan, sandang dan papan. Yang akan diulas pada bab ini adalah kebutuhan akan papan. Kebutuhan ini adalah untuk memberikan tempat berteduh yang berupa sebuah rumah.

Rumah, selain merupakan suatu kebutuhan dasar juga dapat dijadikan indikator kesejahteraan dari pemiliknya. Banyak aspek dari perumahan yang dijadikan indikator kesejahteraan diantaranya adalah luas lantai, sumber air minum, sumber air mandi, tempat buang air besar, dan jarak antara tempat buang air besar dengan sumur.

6.1. Luas Lantai.

Luas lantai adalah jumlah luas lantai dari setiap bagian tempat tinggal yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh anggota rumahtangga, termasuk di dalamnya teras, garasi, WC, dan gudang dalam satu bangunan. Tidak termasuk di dalamnya luas lantai bangunan untuk usaha seperti dagang, salon dan sebagainya.

Luas lantai dapat dijadikan sebagai ukuran rumah yang sehat. Semakin luas rumah yang dihuni maka semakin luas ruang gerak untuk penghuninya. Di DKI Jakarta, dengan tingkat kepadatan yang tinggi maka cukup sulit untuk mendapatkan rumah luas. Pada tahun 1990, rumah dengan luas lantai antara 20-49 m² merupakan rumah yang terbanyak dihuni oleh masyarakat DKI Jakarta yaitu 34 persen diikuti dengan rumah berluas lantai 50-99 m² sekitar 29 persen. Pada tahun 1995, terjadi pergeseran dimana rumah berluas lantai antara 50-99 m² semakin banyak dihuni yaitu sekitar 33 persen dan rumahtangga yang menghuni rumah dengan luas lantai 20-49 m² menurun menjadi 32 persen. Keadaan ini cukup menggembirakan karena menandakan semakin banyak rumahtangga yang mampu tinggal di rumah berluas lantai cukup luas. Hal yang menggembirakan lainnya adalah semakin menurunnya rumahtangga yang menempati

rumah dengan luas lantai kurang dari 20 m², yaitu 16 persen pada tahun 1990 menjadi 14 persen pada tahun 1995. Sedangkan rumahtangga yang tinggal di rumah dengan luas lantai lebih dari 100 m² cukup tinggi yaitu 21 persen pada tahun 1990 dan relatif tidak berubah pada tahun 1995.

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwa telah terjadi penurunan persentase rumahtangga yang menempati rumah dengan luas lantai yang lebih sempit (kurang dari 49 m²), dan sebaliknya terjadi peningkatan persentase rumahtangga yang tinggal di rumah yang luas lantainya lebih lapang (50-99 m²) dan terakhir adalah persentase rumahtangga yang menempati rumah yang luas (lebih dari 100 m²) relatif tidak berubah. Sehingga selama lima tahun terakhir, tingkat kesejahteraan masyarakat DKI Jakarta ditinjau dari luas lantai rumah yang ditinggalkannya menunjukkan peningkatan.

Dalam skala kotamadya, rumahtangga yang menempati rumah dengan luas lantai kurang dari 49 m² mengalami penurunan, kecuali di Jakarta Pusat yang dapat dikatakan relatif tidak berubah. Di seluruh kotamadya, persentase rumahtangga yang menempati rumah yang cukup luas (50-99m²) juga mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir.

Sedangkan persentase rumahtangga yang menghuni rumah berluas lantai lebih dari 100 m² tidak sama di setiap kotamadya. Di Jakarta Selatan, rumahtangga yang menempati rumah yang luas meningkat persentasenya dari 26 persen pada tahun 1990 menjadi 31 persen pada tahun 1995. Pembangunan rumah mewah yang cukup marak di wilayah ini diduga menyebabkan peningkatan persentase rumahtangga yang tinggal di rumah berlantai lebih luas.

Di Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara terjadi penurunan persentase rumahtangga yang menghuni rumah berlantai luas. Pada tahun 1990, persentase rumahtangga yang berlantai lebih dari 100 m² di Jakarta Pusat, Jakarta Barat, dan Jakarta Utara tercatat sebesar 23 persen, 20 persen dan 17 persen. Persentase tersebut menurun pada tahun 1995 menjadi 19 persen, 16 persen dan 14 persen untuk daerah Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Penurunan ini mungkin disebabkan karena digunakannya rumah untuk kegiatan lain seperti usaha oleh rumahtangga. Seperti yang telah diungkapkan di atas bahwa luas lantai yang dihitung adalah luas lantai

yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari dan bukan untuk usaha. Sehingga rumahtangga yang mempunyai rumah dengan luas lantai yang luas tetapi sebagian dari luas lantai tersebut digunakan untuk usaha maka luas lantai yang dicatat akan dikurangi dengan luas lantai yang digunakan untuk usaha.

6.2. Sumber Dan Penggunaan Air.

Program air bersih merupakan program yang termasuk dalam susunan skala prioritas proyek yang dilakukan pemerintah dari tahun ke tahun dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Air leiding relatif lebih sehat dan bersih dibandingkan sumber air lainnya karena air tersebut telah mengalami proses pembersihan dan penyehatan yang dilakukan oleh PDAM Jaya. Air yang bersumber dari air tanah mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk tercemar sehubungan dengan keadaan DKI Jakarta yang merupakan kota dengan tingkat pencemaran ketiga tertinggi di dunia setelah Kota Mexico dan Bangkok menurut hasil penelitian United Nations Environment Program (UNEP) (Media Indonesia tanggal 8 April 1996). Tabel 6.2 memaparkan indikator tentang penggunaan air untuk mandi dan sumbernya pada tahun 1980 dan 1990.

Ada beberapa sumber yang dapat digunakan sebagai sumber air mandi atau pun minum seperti air leiding, pompa air, sumur perigi, dan lainnya. Sumur pompa merupakan jenis sumber air yang pengambilan airnya menggunakan pompa yang diperoleh dari pompa listrik/disel sendiri dan mulut sumur tertutup permanen. Sumur perigi adalah jenis sumber air yang pengambilan airnya menggunakan gayung atau ember. Sedangkan sumber air lainnya seperti mata air, air sungai, air hujan dan lainnya.

Pada tahun 1980, sebagian besar rumahtangga di DKI Jakarta (81,05 persen) menggunakan air pompa dan sumur untuk mandi. Rumahtangga yang menggunakan air leiding untuk keperluan yang sama hanya sekitar 12,85 persen.

Sepuluh tahun berikutnya, rumahtangga yang menggunakan air untuk mandi berasal dari pompa air dan sumur menurun menjadi 74,68 persen. Penurunan tajam terjadi pada penggunaan air dari sumur 38,60 persen tahun 1980 menjadi 14,28 persen

tahun 1990. Sedangkan penggunaan pompa untuk mendapatkan air mandi justru naik dari 42,45 persen tahun 1980 menjadi 60,40 persen tahun 1990. Peningkatan sekitar 2 kali terjadi pada penggunaan air leideng untuk mandi dari 12,85 persen tahun 1980 menjadi 24,47 persen tahun 1990.

Peningkatan penggunaan air leideng dan pompa air dan penurunan penggunaan air sumur untuk mandi, diduga karena rumahtangga pengguna air beralih dari air sumur ke air leideng dan pompa air.

Untuk skala Kotamadya, sumber air untuk mandi tampak bervariasi berdasarkan letak atau ketinggian dan sentra perkotaan. Semakin jauh dari laut, rumahtangga cenderung menggunakan 2 sumber yang massal seperti di atas yaitu pompa air atau sumur. Pola ini terlihat untuk Kotamadya Jakarta Selatan. Pada setiap kotamadya terlihat adanya penurunan persentase pengguna air sumur dan peningkatan pengguna pompa air untuk mandi selama sepuluh tahun terakhir yaitu tahun 1980-1990.

Di sentra perkotaan, yaitu Jakarta Pusat, air sumur bukan pilihan penting untuk mandi karena populasinya diperkirakan 17,62 persen pada tahun 1980 dan turun menjadi 3,40 persen pada tahun 1990. Sumber air mandi yang menjadi modus adalah pompa air yaitu 58,55 persen tahun 1980 dan turun menjadi 64,55 persen tahun 1990. Penggunaan air leideng menempati urutan ke dua yaitu 22,65 persen tahun 1980, dan naik menjadi 31,50 persen pada tahun 1990.

Pembahasan air berasal dari leideng untuk mandi mungkin perlu dipisahkan pengertian tentang pengguna dengan pelanggan sumber ini terutama di Jakarta. Untuk Jakarta Utara, kata yang lebih baik mungkin pengguna air leideng dari pada pelanggan. Dilihat dari pemakaian air leideng, rumahtangga di Jakarta menggunakan sekitar 22,20 persen pada tahun 1980 dan naik tajam menjadi 61,35 persen tahun 1990.

Untuk negara-negara maju, sumber air mandi dan minum mungkin bukan suatu permasalahan karena sebagian besar telah menggunakan air leideng. Kota-kota besar di negara berkembang seperti Jakarta, penggunaan sumber air untuk mandi dapat berbeda dengan sumber air untuk minum. Penyebab perbedaan ini mungkin erat kaitannya dengan sarana yang tersedia dan pendapatan masyarakat di daerah tertentu. Untuk kota yang terletak di pinggir laut seperti Jakarta tidak jarang dijumpai terutama di daerah tepi

laut atau bahkan sentra perkotaan menggunakan air leideng untuk minum tetapi menggunakan sumber air yang lain untuk mandi.

Sumber air yang banyak digunakan untuk minum adalah leiding. Pada tahun 1993, rumahtangga yang menggunakan leiding sebagai sumber air minumnya tercatat sebesar 46 persen kemudian meningkat menjadi sekitar 47 persen pada tahun 1995. Sedangkan rumahtangga yang menggunakan pompa air adalah sekitar 43 persen pada tahun 1993 dan meningkat menjadi 46 persen pada tahun 1995. Rumahtangga yang menggunakan sumur perigi sebagai sumber air minumnya mengalami penurunan yaitu 9 persen pada tahun 1993 menjadi 5 persen pada tahun 1995 (Tabel 6.3).

Di Jakarta Selatan, sumber air minum terbesar yang digunakan oleh rumah tangga adalah pompa air yaitu 67 persen pada tahun 1993 dan meningkat menjadi 75 persen pada tahun 1995. Di wilayah ini, keadaan wilayahnya relatif masih rimbun dengan pepohonan dan mempunyai daerah resapan air yang relatif lebih baik seperti daerah Ragunan. Sehingga ada dugaan bahwa penggunaan pompa air sebagai sumber air minum terbesar di wilayah ini diduga karena wilayah selatan Jakarta relatif air tanahnya masih bersih dan tingkat pencemarannya relatif rendah yang menyebabkan air tanahnya masih dapat digunakan sebagai sumber air minum.

Seperti halnya di Jakarta Selatan maka di Jakarta Timur pun sumber air terbesar yang digunakan oleh rumahtangga adalah pompa air yaitu 74 persen pada tahun 1993 dan 70 persen pada tahun 1995. Dugaan yang sama pun berlaku untuk Jakarta Timur, yaitu air tanah di wilayah Jakarta Timur relatif masih dapat dimanfaatkan sebagai air minum karena wilayah ini mempunyai daerah-daerah yang masih banyak ditumbuhi dengan pepohonan seperti Cibubur, Cipayung, Cijantung dan sekitarnya. Penurunan persentase rumahtangga yang menggunakan pompa air sebagai sumber air minum diikuti dengan peningkatan persentase rumahtangga yang menggunakan leiding sebagai sumber air minumnya. Ada dugaan bahwa banyak rumahtangga yang beralih menggunakan leiding sebagai pengganti pompa air untuk air minumnya. Peralihan ini terutama disebabkan oleh perluasan jaringan PAM, peningkatan kesejahteraan dan kesadaran masyarakat untuk memasang jaringan PAM.

Sedangkan sumber air minum terbesar di tiga wilayah kota lainnya yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Barat dan Jakarta Utara adalah air leiding, hal ini dapat dimengerti karena tingkat pencemaran di tiga wilayah tersebut relatif tinggi juga sedikitnya pepohonan menyebabkan tidak adanya daerah resapan air yang dapat menampung air tanah yang bersih. Jakarta Utara merupakan kotamadya terbesar yang rumahtangganya mempunyai ketergantungan yang tinggi terhadap air leiding sebagai sumber air minumannya. Pada tahun 1993, 94 persen rumahtangga di Jakarta Utara menggunakan leiding sebagai sumber air minumannya. Sedangkan pada 1995, mengalami kenaikan 1 angka menjadi 95 persen. Hal tersebut terjadi karena air tanah di Jakarta Utara telah tercemari oleh air laut sehingga berasa asin. Rumahtangga yang menggunakan air leiding ini bukanlah pelanggan PDAM Jaya saja melainkan juga dengan membelinya dari penjaja air yang umum dijumpai di wilayah ini.

6.3. Tempat Buang Air Besar

Kepemilikan tempat buang air besar dapat juga dijadikan ukuran kesejahteraan suatu rumahtangga. Rumah tangga yang mempunyai kakus sendiri dapat dikatakan lebih sejahtera dibandingkan jika rumahtangga tersebut membuang air besarnya ke kakus umum atau lainnya.

Jenis tempat buang air besar yang digunakan oleh rumahtangga di DKI Jakarta dibagi dalam 4 jenis, yaitu kakus sendiri, kakus bersama, kakus umum dan lainnya. Kakus sendiri adalah kakus yang hanya digunakan oleh satu rumahtangga saja. Kakus bersama adalah kakus yang digunakan oleh beberapa rumahtangga, dan penguasaannya bukan oleh salah satu rumahtangga. Kakus umum adalah kakus yang penggunaannya tidak terbatas pada rumahtangga tertentu, tetapi siapapun dapat menggunakannya. Sedangkan tempat pembuangan air besar lainnya adalah selain yang di atas seperti sungai, kolam, dan lainnya.

Pada tahun 1993, sekitar 69 persen dari 1.9 juta rumahtangga di DKI Jakarta menggunakan kakus sendiri untuk membuang air besarnya. Persentase ini meningkat menjadi 70 persen dari 2 juta rumahtangga di DKI Jakarta. Hal ini memberikan indikasi bahwa kemampuan masyarakat untuk memiliki kakus sendiri semakin meningkat. Kakus

bersama yang digunakan untuk buang air besar pun cukup tinggi yaitu sekitar 21 persen pada tahun 1993 dan persentase ini relatif tidak berubah pada tahun 1995. Persentase yang cukup tinggi dari penggunaan kakus bersama ini mungkin rumahtangga tersebut menyadari pentingnya memiliki kakus sendiri tetapi kemampuan ekonomi mereka tidak mendukung atau juga rumahtangga yang menggunakan kakus bersama umumnya adalah mereka yang menyewa atau mengontrak bersama pada suatu rumah.

Persentase rumahtangga yang menggunakan kakus umum menunjukkan peningkatan dari 6 persen pada tahun 1993 menjadi 9 persen pada tahun 1995. Sedangkan yang menggunakan tempat pembuangan air besar lainnya mengalami penurunan dari 4 persen pada tahun 1993 menjadi 1 persen pada tahun 1995. Mungkin rumahtangga yang 2 tahun lalu membuang air besarnya ke tempat pembuangan lain seperti sungai, kolam atau lainnya berganti membuang air besarnya ke kakus umum. Hal ini mungkin juga ditunjang oleh peningkatan penyediaan kakus umum di kelurahan-kelurahan khususnya kelurahan-kelurahan yang mendapat bantuan IDT/INGUB.

Uraian di atas mencerminkan keadaan ini cukup menggembirakan karena kemampuan masyarakat DKI Jakarta untuk memiliki kakus sendiri atau minimal mempunyai kakus umum semakin meningkat.

Lokasi dan jenis tempat penampungan kotoran akhir dapat dikaitkan dengan aspek sanitasi rumahtangga dan sanitasi lingkungan tempat tinggalnya. Penampungan kotoran yang dimaksud dapat berupa penampungan kotoran manusia maupun penampungan sampah. Lokasi penampungan kotoran harus memperhatikan jaraknya dengan sumber air minum dalam hal ini adalah air yang bersumber dari pompa air/sumur. Karena kotoran manusia yang ditampung dapat merembes pada tanah disekitarnya. Sedangkan penampungan sampah dapat menimbulkan banyak bibit penyakit. Semakin dekat jarak antara pompa/sumur pada tempat penampungan kotoran semakin besar pula kemungkinan air sumur/pompa tersebut tercemar oleh rembesan air kotoran maupun bibit penyakit, sehingga derajat higienitas air yang diminum sangat rendah.

Pada tahun 1993, rumahtangga yang mempunyai jarak antara tempat penampungan kotoran dengan sumur kurang dari 6 meter adalah 43 persen dan angka

ini merupakan yang tertinggi. Kemudian diikuti dengan jarak antara 6-10 meter yaitu 37 persen rumahtangga. Sedangkan yang mempunyai jarak lebih dari 11 meter sebanyak 13 persen, sisanya atau sekitar 12 persen adalah rumahtangga yang tidak mengetahui jarak antara penampungan kotoran dan sumur/pompanya. Rumahtangga tersebut mungkin membuang kotorannya di kakus umum atau tempat pembuangan air besar lainnya (Tabel 6.5).

Pada tahun 1995, terlihat adanya pergeseran dimana rumahtangga yang mempunyai jarak sumur/pompa dengan tempat penampungan kotoran sekitar 6-10 meter dan yang lebih dari 11 meter mengalami peningkatan yaitu menjadi 44 persen dan 15 persen. Sedangkan rumahtangga yang mempunyai jarak kurang dari 6 meter atau tidak mengetahui jarak antara sumur/pompa dengan tempat penampungan kotoran mengalami penurunan masing-masing menjadi 36 persen dan 5 persen. Indikasi yang diperoleh dari uraian di atas adalah semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melindungi sumber air minumannya dari pencemaran terutama pencemaran kotoran manusia atau sampah. Pada gilirannya akan meningkatkan derajat kesehatan dari rumahtangga.

Jenis penampungan kotoran akhir pun berperan dalam menciptakan lingkungan yang sehat. Ada beberapa jenis tempat penampungan kotoran akhir yaitu tangki, kolam/sawah, sungai/danau, lobang tanah, pantai/tanah terbuka, dan lainnya. Distribusi persentase rumahtangga menurut jenis penampungan kotoran akhir dapat dilihat pada Tabel 6.6.

Pada tahun 1995, sekitar 72 persen rumahtangga di DKI Jakarta menggunakan tangki sebagai tempat penampungan kotoran akhir dan 12 persen menggunakan lobang tanah, sedangkan yang terendah adalah pantai/tanah terbuka yaitu di bawah 1 persen. Penggunaan tangki sebagai tempat penampungan kotoran akhir merupakan suatu upaya untuk meminimalkan rembesan air kotoran pada air tanah di sekitarnya.

Di semua kotamadya, persentase rumahtangga yang menggunakan tangki sebagai tempat penampungan kotoran akhir merupakan yang tertinggi. Di Jakarta Utara, persentase rumahtangga yang menggunakan pantai/tempat terbuka sebagai tempat penampungan kotoran akhir tercatat di atas dua persen hal ini dapat dimengerti mengingat keadaan geografis wilayah ini yang berbatasan dengan laut.

Tabel 6.1. Persentase rumahtangga menurut luas lantai bangunan dan Kotamadya di DKI Jakarta, Tahun 1990 - 1995

Kotamadya/ Tahun	Luas lantai (m2)					Jumlah persentase Ruta
	< 20	20 - 49	50 - 99	100 - 149	150 >	
Jakarta Selatan						
1990	13,03	32,11	28,93	11,33	14,60	100,00 392.474
1995	12,73	27,77	28,76	14,55	16,20	100,00 453.750
Jakarta Timur						
1990	13,62	34,59	31,47	11,12	9,20	100,00 444.975
1995	10,86	32,65	35,94	12,50	8,06	100,00 530.176
Jakarta Pusat						
1990	17,22	33,75	25,89	9,85	13,29	100,00 224.592
1995	14,64	35,61	30,26	10,53	8,96	100,00 234.688
Jakarta Barat						
1990	18,16	34,31	27,85	10,09	9,59	100,00 383.880
1995	14,49	32,43	37,04	9,96	6,09	100,00 461.700
Jakarta Utara						
1990	19,59	35,69	27,43	9,32	7,97	100,00 294.292
1995	21,03	33,17	31,92	8,89	4,99	100,00 341.652
DKI Jakarta						
1990	15,97	34,04	28,70	10,47	10,82	100,00 1.740.213
1995	14,26	31,93	33,24	11,54	9,02	100,00 2.021.966

Sumber: - Penduduk DKI Jakarta, Hasil Sensus Penduduk 1990, Kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta.
- Susenas 1995, BPS, Jakarta.

Tabel 6.2. Distribusi persentase rumahtangga menurut Kotamadya dan Sumber air mandi DKI Jakarta, Tahun 1980 - 1990.

Kotamadya	Sumber air mandi							Jumlah	
	Leiding	Pompa Air	Sumur/ Perigi	Mata Air	Sungai	Air Hujan	Lain nya	Persen tase	Rumah tangga
Jakarta Selatan									
1980	4,47	45,58	48,67	0,27	0,63	0,01	0,37	100,00	295.606
1990	13,58	67,45	18,20	0,08	0,04	0,01	0,64	100,00	392.474
Jakarta Timur									
1980	9,25	43,52	44,58	0,13	2,17	-	0,35	100,00	278.081
1990	11,76	72,15	15,11	0,06	0,21	0,01	0,70	100,00	444.975
Jakarta Pusat									
1980	22,65	58,55	17,62	0,03	0,28	-	0,87	100,00	221694
1990	31,50	64,55	3,46	0,05	0,01	-	0,43	100,00	224.592
Jakarta Barat									
1980	10,68	49,04	35,73	0,04	2,26	-	2,25	100,00	235.127
1990	17,95	69,06	12,36	0,14	0,18	0,01	0,30	100,00	383.880
Jakarta Utara									
1980	22,20	9,86	42,14	0,08	0,89	0,03	24,80	100,00	194.428
1990	61,35	18,78	18,58	0,04	0,42	-	0,83	100,00	294.292
DKI Jakarta									
1980	12,85	42,45	38,60	0,12	1,27	0,01	4,69	100,00	1.224.936
1990	24,47	60,40	14,28	0,08	0,18	0,01	0,59	100,00	1.740.213

Tabel 6.3. Distribusi persentase rumahtangga menurut Kotamadya dan Sumber air minum di DKI Jakarta, Tahun 1993 dan 1995.

Kotamadya	Sumber air minum				Jumlah	
	Leiding	Pompa Air	Sumur/ Perigi	Lainnya	Persentase	Rumah Tangga
Jakarta Selatan						
1993	12,23	66,58	20,52	0,67	100,00	410.736
1995	10,17	75,37	12,89	1,57	100,00	453.750
Jakarta Timur						
1993	13,99	74,16	11,36	0,49	100,00	487.215
1995	20,72	69,65	7,98	1,63	100,00	530.176
Jakarta Pusat						
1993	65,05	32,32	2,47	0,16	100,00	229.824
1995	73,19	25,08	1,31	0,41	100,00	234.688
Jakarta Barat						
1993	60,94	32,73	3,12	3,21	100,00	423.168
1995	62,22	34,32	1,15	2,30	100,00	461.700
Jakarta Utara						
1993	94,08	1,81	0,91	3,20	100,00	317.376
1995	95,43	1,66	0,33	2,58	100,00	341.652
DKI Jakarta						
1993	46,01	43,16	9,16	1,67	100,00	1.868.319
1995	46,54	46,21	5,46	1,79	100,00	2.021.966

Sumber: Susenas 1993 - 1995, BPS, Jakarta.

Tabel 6.4. Distribusi persentase rumahtangga menurut Kotamadya dan Tempat buang air besar di DKI Jakarta, Tahun 1993 dan 1995.

Kotamadya	Tempat buang air besar				Jumlah	
	Kakus Sendiri *)	Kakus Bersama	Kakus Umum	Lainnya	Persentase	Rumah Tangga
Jakarta Selatan						
1993	74,13	21,94	1,34	2,59	100,00	410.736
1995	75,12	20,58	3,97	0,33	100,00	453.750
Jakarta Timur						
1993	69,38	18,93	6,26	5,43	100,00	487.215
1995	75,16	18,59	4,77	1,48	100,00	530.176
Jakarta Pusat						
1993	71,71	17,68	9,46	1,15	100,00	229.824
1995	66,69	16,45	16,45	0,45	100,00	234.688
Jakarta Barat						
1993	68,67	22,13	8,55	0,65	100,00	423.168
1995	68,40	19,67	10,04	1,89	100,00	461.700
Jakarta Utara						
1993	59,46	24,26	6,25	10,03	100,00	317.376
1995	59,68	23,69	15,63	1,00	100,00	341.652
DKI Jakarta						
1993	68,87	21,07	6,09	3,97	100,00	1.868.319
1995	70,01	19,90	8,98	1,11	100,00	2.021.966

Sumber: Susenas 1993 dan 1995, BPS, Jakarta.

*) dengan dan tanpa tangki septik

Tabel 6.5. Persentase rumahtangga menurut Kotamadya dan jarak pompa/sumur ke penampungan kotoran di DKI Jakarta, Tahun 1993 dan 1995.

Kotamadya	Jarak pompa/sumur ke penampungan (meter)				Jumlah
	< 6	6 - 10	> 11	TT	
Jakarta Selatan					
1993	33,05	41,74	19,20	6,02	100,00
1995	31,78	43,34	20,87	4,01	100,00
Jakarta Timur					
1993	44,19	35,06	10,57	10,18	100,00
1995	45,59	40,34	10,71	3,36	100,00
Jakarta Pusat					
1993	70,92	20,57	6,86	1,65	100,00
1995	26,69	35,58	18,40	19,33	100,00
Jakarta Barat					
1993	45,41	44,50	5,28	4,82	100,00
1995	24,77	57,87	13,42	3,94	100,00
Jakarta Utara					
1993	69,70	91,09	9,09	12,12	100,00
1995	62,50	29,17	8,33	0,00	100,00
DKI Jakarta					
1993	42,74	37,47	12,53	7,26	100,00
1995	36,03	43,87	15,36	4,63	100,00

Sumber: Susenas 1993 dan 1995, BPS, Jakarta.

Tabel 6.6. Persentase rumahtangga menurut Kotamadya dan tempat penampungan kotoran akhir di DKI Jakarta, Tahun 1995.

Jenis Penampungan Kotoran akhir	Jakarta Selatan	Jakarta Timur	Jakarta Pusat	Jakarta Barat	Jakarta Utara	DKI Jakarta
Tangki	81,8	68,7	67,4	76,1	63,4	72,2
Kolam/Sawah	1,3	4,4	2,1	1,2	2,4	2,4
Sungai atau Danau	7,4	4,4	13,1	5,4	8,1	6,9
Lobang tanah	7,6	12,8	14,0	13,2	16,5	12,5
Pantai/Tanah terbuka	-	0,3	0,3	0,7	2,1	0,6
Lainnya	1,9	9,9	2,7	2,2	7,5	5,3
Jumlah Persentase Rumahtangga	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	453.750	530.176	234.688	461.700	341.652	2021.966

Sumber: Susenas 1995, BPS, Jakarta.

BAB VII PENDAPATAN DAN PENGELUARAN RUMAHTANGGA

Beberapa aspek yang dapat mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat adalah aspek pendapatan, tingkat konsumsi dan pola konsumsi. Besarnya tingkat pendapatan seseorang sangat menentukan besarnya tingkat dan pola konsumsi rumahtangga.

Berdasarkan Engel's Law bahwa peningkatan pendapatan akan diikuti oleh pertumbuhan pola dari komposisi pengeluaran untuk makanan ke pengeluaran bukan makanan. Di negara-negara maju, persentase pengeluaran penduduk untuk konsumsi makanan biasanya berada di bawah 50 persen. Sedangkan komposisi pengeluaran untuk makanan di negara-negara berkembang pada umumnya di atas 50 persen. Disamping itu, di negara-negara berkembang dari segi pemerataan pendapatan masih sulit diwujudkan. Dalam usaha pemerataan pendapatan ini pemerintah berupaya memberantas kemiskinan dengan jalan pemerataan pembangunan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan. Dengan pemerataan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.

7.1. Distribusi pendapatan dan Gini Ratio

Ada sejumlah indikator untuk menilai tingkat ketidakmerataan (ketimpangan) pendapatan penduduk antara lain Gini Ratio dan Kriteria Bank Dunia. Gini Ratio merupakan ukuran distribusi pendapatan yang mempunyai nilai 0 sampai dengan 1. Apabila nilai gini ratio mendekati 0, kesenjangan distribusi pendapatan dianggap rendah. Sebaliknya, apabila gini ratio mendekati angka 1, maka kesenjangan distribusi pendapatan dianggap makin tinggi. Gini Ratio dibagi dalam tiga kategori:

- Gini Ratio $> 0,50$, keadaan ini menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan tinggi.
- Gini Ratio $0,4 - 0,5$, keadaan ini menggambarkan distribusi pendapatan dengan tingkat ketidakmerataan sedang.

- Gini Ratio $< 0,40$, keadaan ini menggambarkan distribusi pendapatan yang merata secara relatif.

Kriteria Bank Dunia menggolongkan penduduk menjadi tiga kelas yaitu, 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk berpendapatan sedang, dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut Kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan rendah, kemudian diidentifikasi intensitas kemiskinannya dengan kriteria:

1. Bila menerima kurang dari 12 persen dari jumlah pendapatan, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan tinggi.
2. Bila menerima antara 12 sampai 17 persen, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan sedang.
3. Bila menerima lebih besar dari 17 persen, menggambarkan distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan rendah.

Distribusi pembagian pendapatan dan gini ratio DKI Jakarta sejak tahun 1984 sampai tahun 1993 dapat digambarkan pada Tabel 7.1. Ketimpangan distribusi pendapatan penduduk DKI Jakarta masih ada. Meskipun dalam kategori ketimpangan rendah.

Pada tahun 1984, penduduk DKI Jakarta dengan 40 persen berpendapatan rendah sebesar 23 persen. Kemudian tahun 1985 dan tahun 1986 penduduk dengan 40 persen pendapatan rendah tercatat 22 persen. Selama tujuh tahun terakhir, penduduk dengan 40 persen berpendapatan rendah tercatat sekitar 21 persen. Penduduk dengan 40 persen berpendapatan sedang, tahun 1984 tercatat 38 persen dan sejak tahun 1985 sampai dengan tahun 1993 tidak mengalami peningkatan, tercatat sebesar 37 persen. Selanjutnya, pada penduduk dengan 20 persen berpendapatan tinggi, sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1993 angkanya selalu bervariasi, dilaporkan mencapai 39 sampai 42 persen. Keadaan ini berarti sebagian golongan penduduk yang berpendapatan rendah telah bergeser ke golongan penduduk yang berpendapatan lebih tinggi.

Selanjutnya, ketimpangan pendapatan penduduk melalui Gini Ratio, sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1993, secara umum cenderung turun. Namun, angka Gini Ratio ini naik sedikit dari 0,2940 menjadi 0,3270 masing-masing pada tahun 1984 dan tahun 1985. Selain itu, gini ratio dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1990 juga meningkat dari 0,2889 menjadi 0,3050 masing-masing untuk tahun 1988 dan tahun 1990. Ini menggambarkan bahwa distribusi pendapatan penduduk DKI Jakarta relatif makin merata.

7.2. Pengeluaran per Kapita menurut Jenis Pengeluaran

Data pengeluaran rumahtangga yang telah dikumpulkan pada survei-survei terdahulu seperti Survei Sosial Ekonomi Nasional, merupakan salah satu cara untuk memperoleh gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Pengumpulan data pengeluaran rumahtangga ini dapat dikatakan mudah. Kuesioner atau instrumen yang digunakan telah dibuat cukup rinci agar semua pengeluaran rumahtangga tidak luput dari pengumpulan data. Namun demikian, hambatan pengumpulan data ini selalu muncul. Diharapkan, adanya data pengeluaran rumahtangga ini dapat memberikan gambaran pola pengeluaran konsumsi rumahtangga menurut jenisnya baik makanan maupun non makanan.

Pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, pengeluaran untuk konsumsi makanan masih merupakan bagian terbesar (lebih 50 persen) dari total pengeluaran rumah tangga. Sebaliknya, pada negara-negara maju pengeluaran rumahtangga yang bersifat sekunder seperti aneka barang dan jasa yang mencakup pengeluaran untuk perawatan kesehatan, rekreasi, olah raga, pendidikan dan lain-lain, adalah merupakan bagian terbesar dari pengeluaran rumahtangga.

Pada umumnya, masyarakat belum terbiasa dengan pencatatan pengeluaran-pengeluaran rumahtangga. Data pengeluaran yang dikumpulkan tidak hanya pengeluaran sehari yang lalu tetapi lebih sering pengeluaran seminggu atau sebulan yang lalu tergantung pada jenis pengeluarannya. Pengeluaran untuk konsumsi makanan dibatasi untuk seminggu yang lalu. Sedangkan pengeluaran untuk non makanan meliputi pengeluaran sebulan yang lalu atau rata-rata selama sebulan.

Disamping itu, jadual waktu pengumpulan data turut membentuk pola pengeluaran rumahtangga.

Pengeluaran rumahtangga per kapita menurut jenis pengeluaran sebulan di DKI Jakarta tahun 1990-1993 tersaji pada Tabel 7.2-7.3. Pengeluaran per kapita sebulan untuk konsumsi makanan sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1993 memperlihatkan peningkatan. Berdasarkan hasil Susenas 1990, pengeluaran per kapita konsumsi makanan tercatat Rp 29.306,00 kemudian awal tahun 1993, pengeluaran per kapita makanan tercatat Rp 43.547,00. Dari rincian jenis pengeluaran makanan, makanan dan minuman jadi menempati urutan pertama untuk pengeluaran makanan per kapita, tercatat masing-masing Rp 5.207,00 dan Rp 10.835,00 pada tahun 1990 dan 1993. Urutan berikutnya adalah padi-padian dengan rata-rata pengeluarannya Rp 5.083,00 dan Rp 5.606,00 pada tahun 1990 dan 1993.

Jenis pengeluaran untuk konsumsi non makanan dirinci menurut pengeluaran perumahan, aneka jasa, pakaian, barang tahan lama, pajak dan pesta. Sebagian pendapatan penduduk yang mengkonsumsi non makanan, sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1993 pengeluaran terbesar digunakan untuk kebutuhan perumahan termasuk bahan bakar, penerangan dan air. Pengeluaran tersebut tercatat tahun 1990 dan tahun 1993 masing-masing Rp 16.266,00 dan Rp 26.991,00. Peningkatan pengeluaran pada perumahan disebabkan karena perumahan merupakan kebutuhan primer yang sangat penting setelah kebutuhan sandang dan pangan. Kemudian, pengeluaran untuk keperluan aneka barang dan jasa merupakan kebutuhan penting kedua setelah pengeluaran untuk perumahan. Tahun 1990 dan 1993, pengeluaran aneka barang dan jasa tercatat masing-masing Rp 13.839,00 dan Rp 20.329,00. Pada jenis lain, sejak tahun 1990 sampai tahun 1993 pengeluaran untuk pakaian, barang tahan lama, pajak, pesta, dan lain-lain berkisar antara Rp 1.087,00 sampai dengan Rp 4.783,00 (Tabel 7.3).

Komposisi pengeluaran per kapita makanan terhadap non makanan di DKI Jakarta telah memperlihatkan masa transisi tradisional-modern. Pada masyarakat tradisional, pengeluaran per kapita untuk makanan lebih besar dari pengeluaran per kapita untuk non makanan. Pada tahun 1990, pola pengeluaran per kapita masyarakat

DKI Jakarta adalah 44 persen untuk makanan dan 56 persen untuk non makanan. Ini menandakan bahwa dengan pendapatan rumahtangga yang ada, sebagian besar dikeluarkan untuk non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan dan rekreasi semakin dominan.

Pada awal tahun 1993, pola pengeluaran per kapita makanan dan non makanan tidak berbeda jauh dengan pola pada tahun 1990. Pengeluaran per kapita untuk makanan sebesar 43 persen dan untuk non makanan sebesar 57 persen pada awal tahun 1993. Dibandingkan dengan pola pengeluaran tahun 1990, pengeluaran untuk makanan tahun 1993 turun satu angka. Peningkatan pengeluaran non makanan atau penurunan pengeluaran makanan tidak selalu berarti pola konsumsi masyarakat Jakarta menuju ke arah modern. Susenas 1993 dilaksanakan pada bulan Februari sampai awal Maret 1993 yang bertepatan dengan bulan Ramadhan. Pada awal bulan ramadhan biasanya konsumsi non makanan, khususnya bagi umat Islam naik dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Oleh karena itu, peningkatan satu angka proporsi pengeluaran non makanan tahun 1993 dibandingkan dengan tahun 1990 sangat mungkin disebabkan oleh pengumpulan data Susenas 1993 bersamaan dengan pelaksanaan ibadah puasa.

7.3. Konsumsi Kalori dan Protein.

Salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk adalah tingkat kecukupan gizi. Kecukupan gizi penduduk antara lain mencakup kebutuhan bahan makanan yang mengandung kalori dan protein.

Dalam bab ini, patokan yang digunakan untuk menetapkan tingkat kecukupan konsumsi kalori dan protein per kapita per hari adalah patokan Departemen Pertanian, yaitu 2000 kalori dan 45 gram protein.

Rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari menurut jenis bahan makanan tahun 1984-1993 di DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel 7.5. Pada tahun 1984, konsumsi kalori per kapita sehari tercatat 1.521 gram. tiga tahun kemudian, konsumsi kalori per kapita sehari cenderung meningkat menjadi 1.709 gram. Akan tetapi, pada tahun 1990 konsumsi kalori per kapita penduduk justru turun sebanyak 33 gram

menjadi 1.676 gram. Tiga tahun kemudian, konsumsi kalori penduduk per kapita sehari mencapai 1.749 gram. Secara umum konsumsi kalori per kapita sehari penduduk DKI Jakarta berada dibawah standard kecukupan konsumsi kalori. Ini menunjukkan bahwa keadaan pendapatan penduduk DKI Jakarta relatif belum meningkat. Rincian jenis bahan makanan dari konsumsi kalori per kapita sehari, ternyata padi-padian mempunyai rata-rata konsumsi kalori tertinggi dibanding dengan konsumsi kalori dari jenis bahan makanan lainnya. Keadaan konsumsi kalori tersebut terjadi sejak tahun 1984 sampai 1995 berturut-turut tercatat 957, 1050, 1020 dan 976 gram masing-masing tahun 1984, 1987, 1990 dan tahun 1993. Keadaan ini disebabkan karena padi-padian merupakan makanan pokok bagi sebagian penduduk Indonesia. Sebaliknya, proporsi rata-rata konsumsi kalori per kapita pada makanan jadi di DKI Jakarta ternyata paling rendah, selain minuman yang mengandung alkohol. Hal ini disebabkan karena rata-rata konsumsi per kapita sehari pada kelompok makanan jadi belum semua tercakup.

Selanjutnya, rata-rata konsumsi protein per kapita sehari menurut jenis bahan makanan sejak tahun 1984 sampai tahun 1993 di DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel 7.6. Pada tahun 1984 konsumsi protein per kapita tercatat 38 gram sehari, kemudian pada tahun 1987 konsumsi protein per kapita meningkat menjadi 43 gram sehari. Demikian pula rata-rata konsumsi protein per kapita pada tahun 1990 masih sama dengan tahun 1987. Tiga tahun kemudian, konsumsi protein per kapita sehari naik empat angka menjadi 47 gram. Secara keseluruhan, kebutuhan konsumsi protein per kapita sehari masih berada dibawah standard kecukupan konsumsi protein. Ini menandakan bahwa keadaan konsumsi protein penduduk DKI Jakarta masih perlu ditingkatkan. Tahun 1984, rincian bahan makanan berupa padi-padian dilaporkan sebesar 18 gram per kapita sehari. Kemudian, tahun 1987 rata-rata konsumsi protein per kapita naik dua angka mencapai 20 gram per kapita sehari. Tiga tahun berikutnya, rata-rata konsumsi protein per kapita sehari turun sedikit menjadi 19 gram per kapita sehari. Demikian halnya tahun 1993, konsumsi protein per kapita pada padi-padian masih sama dengan tahun 1990. Pada padi-padian memperlihatkan angka konsumsi protein per kapita adalah paling tinggi dibandingkan dengan angka konsumsi protein

pada jenis bahan makanan lainnya. Kemudian, urutan kedua pada penduduk yang mengkonsumsi protein per kapita sehari tercatat pada ikan dan kacang-kacangan rata-rata sekitar 6 sampai 7 persen. Jenis bahan makanan lain seperti daging, telur dan susu, umbi-umbian, sayuran dan lain-lain hanya sekitar 0,3 sampai 4 persen rata-rata protein per kapita sehari yang dikonsumsi oleh penduduk.

7.4. Perkembangan Kesejahteraan Konsumsi Makanan.

Perbandingan tingkat kesejahteraan pada beberapa kelompok masyarakat baik menurut golongan, daerah maupun waktu, merupakan salah satu indikator yang penting dalam mencapai kesejahteraan rakyat. Salah satu bentuk pengembangan indikator kesejahteraan rakyat adalah data persepsi masyarakat tentang kesejahteraan konsumsi makanan.

Informasi mengenai persepsi masyarakat DKI Jakarta tentang kesejahteraan konsumsi makanan rumahtangga, dirinci menurut kriteria "jauh lebih baik", "lebih baik", "baik", "jelek", "lebih jelek", dan "jauh lebih jelek". Rincian lebih lanjut tentang tingkat perkembangan kesejahteraan konsumsi makanan rumahtangga sejak tahun 1988 sampai dengan tahun 1991 di DKI Jakarta, dapat dilihat pada tabel 7.7.

Secara umum tingkat kesejahteraan konsumsi makanan rumahtangga di DKI Jakarta tahun 1988, mempunyai kriteria "baik" adalah sebesar 63,8 persen. Selanjutnya, tingkat kesejahteraan konsumsi makanan yang "lebih baik" tercatat 13,2 persen dan yang "jauh lebih baik" hanya sebesar 0,2 persen. Meskipun DKI Jakarta sebagai kota metropolitan, ternyata masih ditemui rumahtangga yang mempunyai tingkat kesejahteraan konsumsi makanan dengan kriteria "jelek" sebesar 16,4 persen dan berkriteria "lebih jelek" sebesar 6,4 persen. Tahun 1993, pola tingkat perkembangan kesejahteraan konsumsi makanan di DKI Jakarta dilaporkan sebesar 67,5 persen dengan tingkat kesejahteraan konsumsi makanan yang "baik". Selanjutnya, rumahtangga yang mempunyai tingkat kesejahteraan konsumsi makanan yang "lebih baik" sebesar 25,8 persen, kemudian rumahtangga yang mempunyai tingkat kesejahteraan yang "jauh lebih baik" tercatat 1,0 persen. Dari uraian di atas, menggambarkan bahwa kesejahteraan konsumsi makanan penduduk DKI Jakarta

cenderung membaik. Ini ditandai dengan mayoritas tingkat kesejahteraan konsumsi makanan penduduk DKI Jakarta berkriteria "baik".

Selanjutnya rumahtangga dengan kesejahteraan konsumsi makanan dengan kriteria "jelek" dan "lebih jelek" selama kurun waktu 1988 -1993 mengalami penurunan. Bagi rumahtangga yang tingkat konsumsi makanannya "jelek" selama kurun waktu tersebut turun 12 angka dan yang tingkat konsumsinya "lebih jelek" turun 5 angka. Penurunan ini menunjukkan kecenderungan bahwa sebagian pendapatan penduduk yang dipergunakan untuk pengeluaran konsumsi makanan semakin kecil. Hal ini disebabkan karena pendapatan penduduk di samping dipergunakan untuk pengeluaran konsumsi makanan, dipergunakan pula untuk pengeluaran bukan makanan.

Tabel 7.1. Distribusi pendapatan dan Gini Ratio DKI Jakarta, Tahun 1980 - 1990

Tahun	Kelompok Penduduk			Gini Ratio
	40 % yang ber-pendapatan rendah	40 % yang ber-pendapatan sedang	20 % yang ber-pendapatan tinggi	
1984	22,98	38,00	39,02	0,2940
1985	21,54	36,68	41,78	0,3270
1986	22,32	36,64	41,04	0,3240
1987	22,88	36,66	40,46	0,2940
1988	23,62	37,10	39,28	0,2889
1990 *)	22,56	36,82	40,62	0,3050
1993 *)	21,06	36,50	42,44	0,4230

Sumber: - Data 1980 sampai dengan 1986 diolah dari Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk DKI Jakarta, Kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta.

*) Pengeluaran untuk konsumsi Penduduk Indonesia per Propinsi 1990 dan 1993, BPS, Jakarta.

Tabel 7.2. Rata-rata pengeluaran makanan per kapita sebulan menurut jenis pengeluaran sebulan (Rp) di DKI Jakarta, Tahun 1990-1993.

Jenis Pengeluaran	Rata-rata pengeluaran makanan (Rp)	
	1990	1993
1. Padi-padian	5.083	5.606
2. Umbi-umbian	263	368
3. I k a n	2.345	3.497
4. Daging	2.232	3.724
5. Telur dan Susu	2.102	3.347
6. Sayur-sayuran	2.477	3.201
7. Kacang-kacangan	1.099	1.508
8. Buah-buahan	2.040	2.696
9. Minyak dan Lemak	1.121	1.526
10. Bahan Minuman	1.339	1.903
11. Bumbu-bumbuan	950	1.063
12. Konsumsi lainnya	574	1.054
13. Makanan dan Minuman jadi	5.207	10.838
14. Minuman Alkohol	52	73
15. Tembakau dan Sirih	2.422	3.141
Total Makanan	29.306	43.547

Sumber: - Susenas 1993, BPS, Jakarta.
 - Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Propinsi tahun 1990, BPS, Jakarta.

Tabel 7.3. Rata-rata pengeluaran non makanan per kapita sebulan menurut jenis pengeluaran sebulan (Rp) di DKI Jakarta, Tahun 1990-1993.

Jenis pengeluaran	Rata-rata pengeluaran non makanan (Rp)	
	1990	1993
1. P e r u m a h a n	16.266	26.991
2. Aneka barang dan jasa	13.926	20.329
3. Pakaian, Alas kaki dan Tutup kepala	3.419	4.783
4. Barang tahan lama	1.087	1.862
5. Pajak dan Asuransi	1.413	2.399
6. Keperluan Pesta dan Upacara	1.471	1.877
Total bukan Makanan	37.582	58.241

Sumber: - Susenas 1993, BPS, Jakarta.

- Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia per Propinsi tahun 1990, BPS, Jakarta.

Tabel 7.4. Distribusi persentase pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk konsumsi makanan dan bukan makanan di DKI Jakarta, Tahun 1984 - 1993.

T a h u n	Konsumsi Makanan	Konsumsi bukan makanan
1984 *)	48,73	51,27
1987 *)	45,35	54,65
1990 *)	43,81	56,19
1993 **)	42,78	57,22

Sumber: *) Pengeluaran untuk konsumsi Penduduk Indonesia per Propinsi, 1990, BPS

***) Susenas 1993, BPS, Jakarta.

Tabel 7.5. Rata-rata konsumsi kalori per kapita sehari menurut jenis bahan makanan di DKI Jakarta, Tahun 1984 - 1993 (Gram).

Jenis bahan Makanan	1984 1)	1987 1)	1990 1)	1993 2)
1. Padi-padian	957,05	1.050,52	1.020,45	976,47
2. Umbi-umbian	26,38	31,86	28,86	32,33
3. I k a n	26,16	29,13	30,86	38,31
4. Daging	31,75	47,34	41,79	50,39
5. Telur dan Susu	48,96	54,47	49,82	71,99
6. Sayur-sayuran	28,80	35,97	32,67	33,99
7. Kacang-kacangan	40,95	57,41	57,54	66,62
8. Buah-buahan	23,68	27,88	32,62	31,63
9. Konsumsi lainnya	296,80	361,37	366,39	418,61
10. Makanan jadi	14,53	12,65	14,36	28,37
11. Minuman yang mengandung alkohol	0,24	0,20	0,24	0,28
12. Tembakau dan Sirih	-	-	-	-
J u m l a h	1.521,30	1.708,80	1.675,60	1.748,99

Sumber: 1) Konsumsi Kalori dan protein Penduduk Indonesia dan Propinsi 1990
Buku 2, BPS.
2) Susenas 1993, BPS

Tabel 7.6. Rata-rata konsumsi protein per kapita sehari menurut jenis bahan makanan di DKI Jakarta, Tahun 1984-1993 (Gram).

Jenis bahan Makanan	1984 1)	1987 1)	1990 1)	1993 2)
1. Padi-padian	18,47	19,90	19,33	18,54
2. Umbi-umbian	0,35	0,44	0,39	0,42
3. I k a n	4,61	5,34	5,75	7,01
4. Daging	2,36	3,13	3,06	3,72
5. Telur dan Susu	2,49	3,10	2,82	4,06
6. Sayur-sayuran	1,83	2,28	1,97	2,13
7. Kacang-kacangan	4,86	5,60	5,62	6,51
8. Buah-buahan	0,28	0,35	0,42	0,39
9. Konsumsi lainnya	2,18	2,70	2,87	3,62
10. Makanan jadi	0,35	0,29	0,38	0,62
11. Minuman yang mengandung alkohol	-	-	-	-
12. Tembakau dan Sirih	-	-	-	-
J u m l a h	37,78	43,33	42,61	47,03

Sumber: 1. Konsumsi Kalori dan protein Penduduk Indonesia dan Propinsi 1990 Buku 2, BPS.
2. Susenas 1993, BPS

Tabel 7.7. Distribusi persentase rumahtangga menurut tingkat perkembangan kesejahteraan konsumsi bahan makanan rumahtangga di DKI Jakarta, Tahun 1988 - 1993.

Tingkat kesejahteraan	1988	1991	1993
Jauh Lebih Baik	0,16	0,90	1,05
Lebih Baik	13,17	22,35	25,83
Baik	63,83	71,03	67,46
Jelek	16,42	5,20	4,57
Lebih Jelek	6,42	0,51	1,02
Jauh Lebih Jelek	-	-	0,07
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: 1. Keadaan Sosial Ekonomi DKI Jakarta 1988, Kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta.
 2. Statistik Kesejahteraan Rumahtangga Tahun 1991 Dan 1994, BPS
 *) Dibandingkan dengan 3 tahun sebelumnya.

B A B VIII INDIKATOR LAINNYA

Banyak aspek yang dapat dijadikan sebagai bahan pengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Pada bab-bab terdahulu telah diulas aspek-aspek yang dijadikan indikator tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu aspek kependudukan, pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, perumahan, serta pengeluaran rumahtangga.

Pada bab ini akan dibahas aspek-aspek lainnya yang dapat dijadikan sebagai ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu perjalanan wisata, akses terhadap media massa, angka kriminalitas, jemaah haji, tempat peribadatan, dan sarana untuk anak terlantar serta kaum lansia.

8.1. Perjalanan Wisata

Di negara maju, perjalanan wisata sudah merupakan kebutuhan dasar (basic needs) disamping pangan, sandang dan papan. Sebagai kompensasi dari tingkat persaingan yang tinggi untuk memperoleh kehidupan yang mapan menyebabkan mereka membutuhkan perjalanan wisata yang dapat membuat mereka lebih rileks. Dengan mengunjungi tempat-tempat wisata menyebabkan mereka dapat meminimalkan kemungkinan untuk terkena stress.

Berbeda halnya dengan negara maju, maka di negara berkembang, perjalanan wisata masih termasuk dalam kebutuhan sekunder. Melakukan perjalanan wisata identik dengan melakukan penambahan pengeluaran, sedangkan masyarakat yang hidup di negara berkembang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan.

Jakarta yang sudah termasuk kota metropolitan dunia memberikan suatu kondisi dimana perlu perjuangan yang keras untuk mendapatkan nafkah dalam upaya mempertahankan hidupnya. Di lihat dari kenyataan tersebut, maka seharusnya penduduk DKI Jakarta sudah menjadikan perjalanan wisata sebagai salah satu kebutuhan dasarnya. Akan tetapi, berbeda dengan di kota-kota besar dunia lainnya, maka perjuangan yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Jakarta baru mencapai taraf

untuk mencukupi kebutuhan untuk pangan, sandang dan papan bukanlah pada taraf untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan lainnya selain tiga kebutuhan tersebut.

Walaupun perjalanan wisata ini masih dijadikan kebutuhan sekunder, namun selama kurun waktu 1992-1995 terlihat adanya peningkatan persentase penduduk yang melakukan perjalanan wisata (Tabel 8.1). Pada tahun 1992, penduduk DKI Jakarta yang melakukan perjalanan wisata minimal 1 kali selama setahun baru mencapai 8 persen. Tiga tahun kemudian angka tersebut meningkat tajam menjadi 18 persen. Keadaan ini cukup menggembirakan karena penduduk DKI Jakarta semakin menyadari pentingnya melakukan perjalanan wisata sebagai kompensasi dari kerja keras mereka untuk mendapatkan nafkah. Selain itu juga dapat dijadikan indikator yang menunjukkan semakin sejahteranya penduduk di DKI Jakarta sehingga mereka dapat menyisihkan sebagian pendapatannya untuk wisata.

Jika dilihat menurut jenis kelamin, maka persentase laki-laki dan perempuan yang melakukan perjalanan wisata tidak memperlihatkan perbedaan. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan perjalanan wisata merupakan kebutuhan manusia dan tidak dibedakan oleh jenis kelamin.

8.2. Akses Terhadap Media Massa

Tingkat kesejahteraan seseorang tidak hanya diukur dari kesejahteraan jasmaniah saja tetapi juga rohaniah. Akses terhadap media massa termasuk dalam kesejahteraan rohaniah yaitu untuk mencukupi rasa keingintahuan dari manusia.

Di Jakarta, rasa keingintahuan banyak dipenuhi oleh media televisi, kemudian diikuti oleh radio dan terakhir adalah surat kabar/majalah (Tabel 8.2). Pada tahun 1995, penduduk DKI Jakarta yang menonton televisi mencapai 92 persen, keadaan ini relatif tidak berubah selama empat tahun terakhir. Persentase yang tinggi ini diduga karena televisi yang merupakan media audio visual yaitu yang menghasilkan suara dan gambar menjadikan lebih komunikatif dengan pemirsanya. Selain itu, jumlah saluran televisi swasta yang cukup banyak menyebabkan pengelola televisi dipacu untuk menyajikan acara yang menarik dan bervariasi untuk menarik pemirsa televisi menonton saluran mereka.

Sedangkan penduduk DKI Jakarta yang mendengarkan radio selama empat tahun terakhir menunjukkan gejala penurunan. Pada tahun 1992, penduduk DKI Jakarta yang mendengarkan radio mencapai 85 persen, kemudian menurun menjadi 74 persen pada tahun 1995. Penurunan ini diduga berkaitan dengan semakin maraknya dunia pertelevisian di Indonesia, yang menyajikan tayangan-tayangan yang menarik bagi pemirsanya.

Media massa yang paling sedikit dimanfaatkan oleh penduduk DKI Jakarta adalah surat kabar/majalah. Bahkan persentase penduduk yang membaca surat kabar/majalah menunjukkan kecenderungan yang menurun. Pada tahun 1992, 62 persen penduduk DKI Jakarta membaca surat kabar/majalah, persentase ini kemudian menurun menjadi 55 persen pada tahun 1995. Keadaan ini merupakan suatu pembenaran dari isu yang didengung-dengungkan oleh para pakar bahwa minat baca di Indonesia masih sangat rendah.

Suatu langkah yang bijaksana jika penyebaran informasi lebih ditekankan media massa televisi, karena media inilah yang paling banyak digemari oleh masyarakat DKI Jakarta.

8.3. Kriminalitas

Banyak faktor yang menyebabkan meningkatnya kriminalitas yaitu faktor lingkungan, peluang, kebutuhan hidup, sosial budaya, pengaruh ekstern dan sebagainya. Berdasarkan hasil survei, selama tiga tahun terakhir, persentase penduduk DKI Jakarta yang menjadi korban tindak kejahatan semakin meningkat. Pada tahun 1992, persentasenya baru mencapai 0,67 persen, kemudian meningkat menjadi 3 persen pada tahun 1995. Keadaan ini cukup menyedihkan, karena memberikan suatu indikasi keadaan di DKI Jakarta semakin tidak aman (Tabel 8.3).

Walaupun persentase penduduk yang menjadi korban tindak kejahatan meningkat, tetapi menurut catatan POLDA METROJAYA, peristiwa kejahatan yang dilaporkan mengalami penurunan dari tahun 1993 yang mencapai 36 ribu kejadian menjadi 30 ribu kejadian pada tahun 1994 (Tabel 8.4). Ada dugaan bahwa banyak tindak kejahatan yang tidak dilaporkan oleh korban. Mungkin banyak pertimbangan yang menyebabkan mereka tidak melaporkan tindak kejahatan yang menimpanya.

Jika dilihat skala waktu peristiwa kriminalitas per menit, maka selang waktu peristiwa kriminalitas semakin panjang. Pada tahun 1993, setiap 14 menit terjadi satu peristiwa kriminal, dalam waktu satu tahun meningkat menjadi satu peristiwa kriminal setiap 18 menit. Walaupun skala waktu terjadinya tindak kejahatan ini semakin panjang, namun tidak dapat dijadikan ukuran bahwa tindak kejahatan di DKI Jakarta semakin jarang, karena seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa ada kemungkinan banyak peristiwa kejahatan yang tidak dilaporkan oleh korban kejahatan.

Dari berbagai jenis tindak kejahatan yang terjadi di DKI Jakarta, maka pencurian dengan pemberatan merupakan jenis tindak kejahatan yang paling banyak dilaporkan (Tabel 8.5). Pada tahun 1994, 49 persen dari peristiwa kriminal yang dilaporkan merupakan pencurian dengan pemberatan. Yang termasuk dalam pencurian dengan pemberatan adalah pencurian ternak, pencurian pada malam hari, pencurian dengan pengrusakan, pencurian ketika adanya suatu kejadian (seperti banjir dan kebakaran) serta pencopetan dengan merusak kantong/dompot. Jenis pencurian dengan pemberatan yang jarang terjadi di DKI Jakarta adalah pencurian ternak. Sedangkan kejahatan terhadap ketertiban umum merupakan tindak kejahatan yang paling sedikit dilaporkan oleh masyarakat DKI Jakarta dan persentasenya hanya mencapai 2 persen pada tahun 1994.

Tabel 8.6 memperlihatkan persentase penyelesaian beberapa peristiwa kejahatan/ pelanggaran selama tahun 1988-1994. Selama kurun waktu enam tahun, persentase penyelesaian perkara untuk tiap jenis tindak kejahatan memperlihatkan pola yang berfluktuasi. Namun dari semua jenis tindak kejahatan itu, tingkat penyelesaian dari peristiwa kejahatan yang dilaporkan masih relatif rendah.

Pada tahun 1994, tercatat 64 persen dari tindak penganiayaan berat yang dilaporkan dapat diselesaikan. Sedangkan tingkat penyelesaian pencurian dengan pemberatan masih cukup rendah yaitu 34 persen. Tabel 8.7 menggambarkan peristiwa kecelakaan lalu lintas yang terjadi di DKI Jakarta selama kurun waktu 1988-1994. Peluang terjadinya kecelakaan lalu lintas per kendaraan selama tujuh tahun terakhir memperlihatkan keadaan yang menurun. Pada tahun 1988, setiap 10000 kendaraan mempunyai peluang 24 peristiwa kecelakaan lalu lintas. Kemudian peluang ini menurun menjadi 9 peristiwa setiap 10000 kendaraan pada tahun 1994.

Pada tahun 1988, skala waktu peristiwa kecelakaan yaitu 1 kejadian setiap 2,55 jam, kemudian menjadi lebih lambat pada tahun 1994 yaitu sekitar 1 kejadian setiap 4,14 jam. Sedangkan rata-rata peristiwa kecelakaan perhari turun dari 9,41 pada tahun 1988 menjadi 5,18 pada tahun 1994. Meskipun keadaan ini memberikan suatu indikasi penurunan, namun bahwa pengguna jalan di DKI Jakarta masih harus ditingkatkan kesadarannya dalam mematuhi peraturan lalu lintas.

Setelah mengulas tentang kriminalitas di DKI Jakarta, sekarang perlu juga diungkapkan mengenai rasa aman dari tindak kejahatan yang dirasakan oleh rumahtangga selama tahun 1991- 1994 (Tabel 8.8). Umumnya, rumahtangga di DKI Jakarta menyatakan bahwa rasa aman dari tindak kejahatan sama baik jika dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya. Pada tahun 1991, tercatat sebanyak 54 persen rumahtangga yang menyatakan rasa aman sama baiknya dan meningkat menjadi 60 persen pada tahun 1994. Sedangkan rumahtangga yang menyatakan bahwa rasa aman jauh lebih buruk dibandingkan dengan tiga tahun yang sebelumnya mencapai 10,43 persen pada tahun 1994 atau lebih tinggi dibanding dengan keadaan pada tahun 1991 yang mencapai 9,51 persen. Sedangkan rumahtangga yang menyatakan bahwa rasa aman jauh lebih baik atau lebih baik dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya mengalami penurunan. Pada tahun 1994, yang menyatakan rasa aman jauh lebih baik dan lebih baik dari tiga tahun sebelumnya masing-masing tercatat sebesar 3 persen dan 22 persen. Sedangkan pada tahun 1991 tercatat masing-masing sebesar 4 persen dan 28 persen.

8.4. Aspek lainnya

a. Tempat Ibadat

Seperti yang telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa tingkat kesejahteraan seseorang tidak hanya diukur dari tercukupinya kebutuhan jasmani, akan tetapi harus tercukupi pula kebutuhan rohaninya. Salah satu tempat untuk pemenuhan kebutuhan rohani ini adalah tempat beribadat.

Tabel 8.9. menunjukkan persentase jumlah tempat ibadah di DKI Jakarta menurut agama selama kurun waktu 1990 -1994. Pada tahun 1994, persentase tempat ibadah

tertinggi adalah langgar, yaitu sekitar 65 persen dari hampir 9 ribu tempat ibadah. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 1993 yang hanya mencapai 63 persen. Langgar adalah tempat beribadah untuk agama Islam yang bangunannya tidak begitu luas. Biaya untuk pembangunannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan biaya pembangunan mesjid, sehingga lebih banyak langgar yang dibangun dibandingkan dengan mesjid. Tempat ibadah lainnya yang ada di DKI Jakarta adalah mesjid (26 persen), gereja (8 persen) dan kuil/klenteng (1 persen).

b. Pemberangkatan Haji

Selama enam tahun terakhir, jumlah penduduk DKI Jakarta yang mendaftarkan diri sebagai calon jemaah haji menunjukkan peningkatan. Pada tahun 1988, jumlah calon jemaah haji yang terdaftar tercatat sebesar 3.835 jiwa kemudian meningkat menjadi 16.906 jiwa pada tahun 1994, atau mengalami peningkatan sebesar 28 persen per tahun. Peningkatan jumlah calon jemaah haji yang terdaftar ini menunjukkan meningkatnya kemampuan masyarakat Islam di DKI Jakarta untuk pergi ke tanah suci dalam rangka menunaikan rukun Islam yang kelima. Tabel 8.10 menunjukkan bahwa pada tahun 1994 telah terjadi peningkatan sebanyak 440 persen jumlah jemaah calon haji yang terdaftar dibandingkan dengan tahun 1988 (Tabel 8.10).

Pada beberapa tahun terakhir, peningkatan kesejahteraan pemeluk agama Islam diiringi dengan keinginan untuk menunaikan ibadah haji. Tidak semua jemaah calon haji yang telah mendaftar dapat berangkat ke tanah suci. Masalah ini terutama disebabkan oleh kuota jemaah calon haji yang ditentukan oleh Pemerintah Arab Saudi.

Jemaah calon haji yang berangkat ke tanah suci, tidak semuanya kembali ke tanah air. Beberapa diantara mereka meninggal ketika sedang menjalankan rukun Islam yang kelima tersebut. Persentase calon haji yang meninggal di tanah suci tidaklah besar, akan tetapi selama kurun waktu 1990-1994, ada kecenderungan peningkatan persentase calon haji yang meninggal di tanah suci. Pada tahun 1990, calon haji yang meninggal di Arab Saudi dapat dikatakan hampir tidak ada, tetapi pada tahun 1994, persentase calon haji yang meninggal ketika menunaikan ibadah haji meningkat menjadi 0,36 persen dari total jemaah calon haji yang berangkat ke Arab Saudi (Tabel 8.11).

c. *Sarana Untuk Penduduk Yang Bermasalah Sosial*

Penduduk yang bermasalah sosial disini dibatasi pada penduduk lanjut usia yang tidak dirawat oleh keluarganya dan anak yang terlantar. Tabel 8.12 menunjukkan jumlah orang tua yang dirawat di panti-panti penampungan. Selama kurun waktu 1989-1994, jumlah orang tua yang dirawat di panti-panti semakin meningkat. Pada tahun 1989, jumlahnya baru sekitar 2 671 orang, kemudian meningkat hampir 4 kalinya menjadi 9 156 orang pada tahun 1994. Peningkatan ini dapat dilihat juga dari rasionya terhadap 10000 penduduk usia 65 tahun ke atas. Pada 1989, rasio mencapai 115 atau setiap 10000 penduduk usia 65 tahun ke atas terdapat 115 orang yang dirawat di panti-panti penampungan. Rasio ini meningkat menjadi 544 pada tahun 1994. Meningkatnya jumlah orang tua yang dirawat di panti-panti penampungan merupakan ciri dari suatu kota besar. Penduduk produktif, terutama sebagian dari mereka yang berada pada golongan ekonomi atas beranggapan bahwa perawatan orang tua mereka tampaknya lebih maksimal bila ditempatkan di panti.

Terdapat sejumlah panti yang menampung dan merawat penduduk lanjut usia, diantaranya adalah Sarana Tresna Werda, Panti Werda dan Home Care. Panti yang paling banyak menampung dan merawat penduduk lanjut usia adalah Home Care. Pada tahun 1994, 89 persen penduduk lanjut usia yang ditampung di panti-panti terdapat di Home Care.

Selain untuk penduduk lanjut usia, banyak pula terdapat panti-panti penampungan untuk anak-anak terlantar. Panti ini dibuat untuk menampung anak-anak yang tidak dirawat oleh sanak keluarganya. Selama kurun waktu 1990-1994, terjadi penurunan jumlah panti asuhan di DKI Jakarta. Pada tahun 1990, jumlahnya mencapai 53 kemudian mengalami penurunan hingga berjumlah 37 pada tahun 1994. Panti asuhan paling banyak terdapat di kotamadya Jakarta Selatan dan Jakarta Timur yaitu 13 dan 12 panti pada tahun 1994, sedangkan di Jakarta Barat tidak terdapat panti asuhan (Tabel 8.13).

Penurunan jumlah panti asuhan diikuti pula dengan penurunan jumlah anak-anak terlantar yang ditampung. Pada tahun 1990, jumlah anak yang ditampung adalah 4 113 anak dan menurun menjadi 2 360 anak pada tahun 1994. Anak-anak yang terlantar

di DKI Jakarta paling banyak ditampung di panti-panti asuhan yang terdapat di Jakarta Timur dan Jakarta Pusat masing-masing sebanyak 990 anak dan 850 anak. Ada kemungkinan banyak anak terlantar yang terdapat di Jakarta Barat ditampung di Jakarta Pusat sehingga rasio anak yang ditampung per panti asuhan di Jakarta Pusat cukup tinggi yaitu 94.

d. *Gubug Liar*

Yang dimaksud dengan gubug liar adalah bangunan-bangunan yang dilihat dari status bangunannya liar serta bersifat sementara, seperti yang terdapat di sepanjang pinggiran rel kereta api, di pinggiran kali, di bawah jembatan dan sebagainya. Gubug liar yang terdapat di DKI Jakarta umumnya dibangun oleh penduduk pendatang yang tidak mempunyai rumah yang layak untuk ditinggali dan mereka bekerja di sektor informal seperti pemulung, pedagang dan sebagainya.

Persentase gubug liar terbesar terdapat di Jakarta Utara dan Jakarta Pusat masing-masing sebesar 35 persen dan 30 persen pada tahun 1994. Seperti yang diketahui bahwa wilayah Jakarta Utara adalah wilayah yang relatif miskin keadaannya dibandingkan dengan keempat wilayah lainnya. Sedangkan Jakarta Pusat merupakan wilayah yang terpadat di DKI Jakarta, mereka yang tidak mempunyai tempat tinggal umumnya mendirikan bangunan-bangunan sementara seperti yang terdapat di sepanjang rel kereta api di daerah Senen.

Tabel 8.1. Persentase Penduduk yang melakukan perjalanan Wisata menurut Jenis Kelamin Di DKI Jakarta, Tahun 1992-1995.

Melakukan perjalanan Wisata/Tahun	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Ya			
1992	8,53	8,37	8,45
1993	11,58	11,38	11,48
1994	15,15	14,14	14,64
1995	18,47	17,40	17,93
Tidak			
1992	91,47	91,63	91,55
1993	88,42	88,62	88,52
1994	85,85	85,86	85,26
1995	81,53	82,60	82,07

Sumber: Susenas 1992-1995, BPS.

Tabel 8.2. Distribusi persentase Penduduk usia 10 tahun ke atas menurut akses terhadap Media Massa , Jenis Kelamin di DKI Jakarta, tahun 1992, 1993 dan 1995.

Akses terhadap Media Massa	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki + Perempuan		
	1992	1993	1995	1992	1993	1995	1992	1993	1995
a. Mendengarkan Radio									
- Ya	85,80	80,60	75,10	84,30	78,10	72,30	85,00	79,30	73,70
- Tidak	14,20	19,40	24,90	15,70	21,90	27,70	15,00	20,70	26,30
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
b. Menonton Televisi									
- Ya	92,00	91,60	92,00	92,70	91,10	93,00	91,90	91,90	92,50
- Tidak	8,00	8,40	8,00	8,30	7,90	7,00	8,10	8,10	7,50
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
c. Membaca Surat Kabar/Majalah									
- Ya	68,10	69,80	61,10	55,20	56,90	48,20	61,60	63,30	54,60
- Tidak	31,90	30,20	38,90	44,80	43,10	51,80	38,40	36,70	45,40
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas 1992, 1993, dan 1995, BPS.

Tabel 8.3. Distribusi Persentase Penduduk Yang Menjadi Korban Kejahatan Menurut Jenis Kelamin Di DKI Jakarta, Tahun 1992, 1995

Terkena tindak Kejahatan	1992	1993	1995
	Ya	0,67	1,20
Tidak	99,33	98,80	97,17
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber; Susenas 1992, 1993 dan 1995, BPS.

Tabel 8.4. Banyaknya peristiwa Kriminal yang dilaporkan. Angka Kriminal per 10.000 penduduk dan Skala waktu peristiwa kejahatan, Tahun 1988-1994.

Tahun	Banyaknya peristiwa yang dilaporkan	Angka Kriminal per 10.000 penduduk		Skala waktu peristiwa kriminal (Menit)
		Banyaknya	Indeks Kejahatan per 10.000 penduduk (tahun dasar = 1988)	
1988	35.270	40,1	100,0	15
1989	44.180	48,5	120,9	12
1990	35.785	38,0	94,8	15
1991	33.507	39,6	98,8	16
1992	35.812	41,5	103,5	15
1993	36.206	41,2	102,7	14
1994	29.783	33,2	82,8	18

Sumber: POLDA METRO JAYA.

Tabel 8.5. Distribusi Persentase Beberapa Jenis Kejahatan Terhadap Jumlah Peristiwa Kejahatan Yang Dilaporkan Di DKI Jakarta, Tahun 1988 - 1994

Tahun	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1988	14,01	34,72	12,20	6,05	9,02	5,16	1,57	11,07	100,00
1989	13,52	30,89	9,13	4,77	9,93	7,95	0,69	47,57	100,00
1990	9,49	41,39	8,83	4,92	7,77	3,98	2,38	60,33	100,00
1991	7,93	41,58	9,07	5,57	9,06	3,17	3,15	66,03	100,00
1992	8,31	40,60	8,94	4,87	9,20	4,23	2,22	21,63	100,00
1993	5,42	34,00	7,48	3,67	7,56	3,47	1,70	36,70	100,00
1994	9,28	48,68	10,40	4,99	11,12	4,36	1,99	9,19	100,00

Sumber: Diolah dari Jakarta Dalam Angka, Kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta.

Keterangan: 1. Pencurian ringan
 2. Pencurian dengan pemberatan
 3. Pencurian dengan kekerasan
 4. Penggelapan
 5. Penipuan
 6. Penganiayaan Berat
 7. Kejahatan terhadap ketertiban umum
 8. Lainnya
 9. Total.

**Tabel 8.6. Persentase Penyelesaian beberapa peristiwa kejahatan/
Pelanggaran Yang Dilaporkan, Tahun 1988 - 1994**

Peristiwa Kejahatan/ Pelanggaran yang dilaporkan	Tahun						
	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Pencurian ringan	60,48	43,60	53,06	64,34	37,60	53,10	54,08
Pencurian dengan pemberatan	57,47	33,40	35,84	37,83	27,90	26,29	34,46
Pencurian dengan kekerasan	56,58	45,20	56,16	62,48	51,80	52,25	53,47
Penggelapan	53,03	45,40	50,53	52,86	40,01	34,26	46,77
Penipuan	34,11	34,20	37,96	39,35	33,71	23,65	31,49
Penganiayaan ringan	46,81	46,60	63,62	64,12	54,11	48,09	53,56
Penganiayaan berat	55,42	48,50	49,22	54,81	51,55	33,57	63,56
Kejahatan terhadap ketertiban Umum	51,20	61,90	49,79	45,67	59,97	51,46	52,70
Lainnya	66,33	47,57	60,33	66,03	37,40	38,00	44,10
Jumlah	57,41	37,50	46,37	49,61	36,66	36,16	34,80

Sumber: Jakarta Dalam Angka 1990, 1991, 1992, Kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta.

**Tabel 8.7. Peluang terjadinya Kecelakaan Lalulintas per kendaraan
Skala waktu peristiwa kecelakaan dan Rata-rata peristiwa
kecelakaan per bulan, tahun 1988-1994.**

Tahun	Peluang terjadinya kecelakaan per kendaraan	Skala waktu peristiwa kecelakaan (jam)	Rata-rata peristiwa kecelakaan per hari
1988	0,0024	2,55	9,41
1989	0,0016	3,52	6,80
1990	0,0016	3,32	7,25
1991	0,0012	4,09	5,87
1992	0,0011	4,23	5,67
1993	0,0009	4,82	4,98
1994	0,0009	4,14	5,18

Sumber: Direktorat Lalulintas, POLDA METRO JAYA.

**Tabel 8.8. Persentase rumahtangga menurut perkembangan rasa aman
dari tindak kejahatan selama tiga tahun terakhir
di DKI Jakarta, Tahun 1991 dan 1994.**

Persepsi Rasa Aman	1991	1994
Jauh lebih baik	4,43	2,99
Lebih baik	27,68	22,44
Sama baik	53,95	60,45
Jauh lebih buruk	9,51	10,43
Lebih buruk	3,98	3,55
Sama buruk	0,45	0,13

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rumahtangga 1991 dan 1994, KSP DKI Jakarta.

Tabel 8.9. Distribusi Persentase Tempat Peribadatan di DKI Jakarta, Tahun 1990-1994

Tahun	Mesjid	Langgar	Gereja	Kuil/Klenteng	Jumlah
1990	23,7	68,1	6,4	1,8	100,00
1991	26,2	66,2	6,0	1,6	100,00
1992	25,5	67,3	5,7	1,6	100,00
1993	26,5	62,6	9,5	1,4	100,00
1994	25,9	64,7	8,3	1,1	100,00

Sumber: Kanwil Departemen Agama DKI Jakarta

Tabel 8.10. Jumlah dan Indeks (1988=100) Jamaah Haji DKI Jakarta, Tahun 1988-1994

Tahun	Jumlah	Indeks
1988	3.835	100,00
1989	3.770	98,30
1990	6.770	176,53
1991	9.447	246,34
1992	11.495	299,74
1993	13.257	345,68
1994	16.906	440,83

Sumber : Kantor Urusan Haji DKI Jakarta.

Tabel 8.11. Jumlah Jamaah Haji DKI Jakarta yang terdaftar persentase yang Berangkat, Meninggal, dan Kembali, Tahun 1988-1994

Tahun	Jumlah terdaftar	Persentase Berangkat 1)	Persentase Meninggal 2)	Persentase Kembali 3)
1988	3.826	98,46	0,12	99,87
1989	3.833	98,36	0,16	99,84
1990	6.777	98,98	0,00	100,00
1991	9.530	99,12	0,17	99,83
1992	11.679	98,42	0,21	99,78
1993	13.257	98,05	0,28	99,73
1994	16.906	99,03	0,36	98,67

Sumber : Kantor Urusan Haji DKI Jakarta

Catatan : 1. Persentase terhadap yang Terdaftar
2. Persentase terhadap yang Berangkat
3. Persentase terhadap yang Berangkat

Tabel 8.12. Banyaknya Orang Tua yang memperoleh Santunan menurut menurut Jenis Sarana dan Ratio Total per 10.000 Penduduk usia 65 Tahun ke atas di DKI Jakarta, Tahun 1989 - 1994

Jenis Sarana	1989	1990	1991	1992	1993	1994
Sarana Tresna Werda	649	1.573	1.549	-	354	968
Panti Werda	187	238	782	840	610	968
Home Care	1.835	2.794	2.986	2.986	3.007	8.188
Jumlah	2.671	4.581	3.768	3.808	3.971	9.156
Ratio total per 10.000 penduduk usia 65 th ke atas	115	320	328	254	253	544

Sumber : Dinas Sosial DKI Jakarta
1) data tidak tersedia.

Tabel 8.13. Jumlah Panti Asuhan dan Anak yang ditampung menurut Kotamadya di DKI Jakarta, Tahun 1990-1994

Rincian	1990	1991	1992	1993	1994
Panti Asuhan	53	42	41	40	37
- Jakarta Selatan	20	14	15	15	13
- Jakarta Timur	19	16	14	13	12
- Jakarta Pusat	10	9	10	9	9
- Jakarta Barat	2	1	-	-	-
- Jakarta Utara	2	2	2	3	3
Anak yang Ditampung	4.113	7.161	3.594	2.443	2.360
- Jakarta Selatan	851	2.224	782	910	355
- Jakarta Timur	1.985	2.571	1.338	1.283	990
- Jakarta Pusat	1.041	2.086	1.338	95	850
- Jakarta Barat	100	25	-	-	-
- Jakarta Utara	136	255	136	155	165
Rata-rata Anak asuh/panti asuhan	78	170	88	61	64
- Jakarta Selatan	43	159	52	61	27
- Jakarta Timur	104	161	96	99	82
- Jakarta Pusat	104	232	104	10	94
- Jakarta Barat	50	25	-	-	-
- Jakarta Utara	68	128	68	52	55

Sumber : Diolah kembali dari JDA 1991-1995, Kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta.

Tabel 8.14. Distribusi Persentase Gubuk Liar menurut Kotamadya di DKI Jakarta, Tahun 1990-1994

Kotamadya	1990	1991	1992	1993	1994
Jakarta Selatan	4,3	3,9	4,2	3,3	2,9
Jakarta Timur	13,1	10,3	14,4	21,9	17,1
Jakarta Pusat	25,4	33,7	23,4	39,3	29,9
Jakarta Barat	12,8	7,8	7,6	14,9	15,0
Jakarta Utara	44,4	44,3	50,3	20,5	35,2

Sumber : Jakarta Dalam Angka 1991-1995, Kantor Statistik Propinsi DKI Jakarta.

BAB IX

KESIMPULAN DAN SARAN

9.1. KESIMPULAN

1. Program-program pemerintah daerah untuk menekan pertumbuhan penduduk yang masih cukup besar, menunjukkan hasil yang diharapkan antara lain dengan kesadaran masyarakat untuk menunda usia perkawinan pertama seperti yang terlihat pada Tabel 2.6.
2. Seiring dengan tertundanya usia perkawinan, rata-rata anak yang pernah dilahirkan juga menunjukkan penurunan yang cukup berarti. Jika pada tahun 1980 rata-rata anak yang dilahirkan per 10 wanita sebesar 29, maka pada tahun 1995 turun menjadi 25.
3. Salah satu indikator yang menunjukkan kesejahteraan rakyat adalah angka harapan hidup. Jika pada tahun 1990 mencapai 66,3 tahun, maka tahun 1995 meningkat menjadi 69,7 tahun.
4. Dalam menjalankan program keluarga berencana, lebih sepertiga (37 persen) wanita usia subur menggunakan suntikan disusul oleh pil (27 persen) dan IUD (23 persen).
5. Program pendidikan di DKI Jakarta secara umum telah mampu menaikkan tingkat pendidikan penduduknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir (1990-1995). Hal ini ditandai oleh meningkatnya tingkat partisipasi sekolah, baik usia sekolah SD, SMTP, maupun SMTA.
6. Walaupun secara umum tingkat pendidikan di DKI Jakarta meningkat, tetapi persepsi masyarakat (rumah tangga) dalam memasukkan anaknya ke SD, SMTP, maupun SMTA tidak mudah. Hanya sekitar 2-3 persen saja yang menyatakan jauh lebih baik dari tahun sebelumnya dan sekitar 20-27 persen yang menyatakan lebih baik dari tahun sebelumnya.
7. Keberhasilan lain dari program pendidikan adalah menurunnya angka buta huruf dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Penurunan angka buta huruf wanita jauh lebih tajam dibandingkan laki-laki.

8. Jumlah pengangguran di DKI Jakarta semakin meningkat, pada tahun 1994 mencapai 11,20 persen dan tahun 1995 menjadi 11,37 persen, yang umumnya merupakan pendatang baru dan mereka sebagian besar berasal dari luar DKI Jakarta.
9. Program kesehatan di DKI Jakarta secara umum juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini ditandai dengan semakin menurunnya angka kematian bayi, angka kematian balita, meningkatnya kesadaran pemberian imunisasi usia balita dan meningkatnya ibu yang menyusui anaknya lebih dari dua tahun, serta penolong kelahiran yang sebagian besar oleh bidan. Kalaupun ada yang ditolong oleh dukun, mungkin mereka adalah migran yang melahirkan anaknya di daerah asal.
10. Rumah yang dihuni dapat dijadikan ukuran kesejahteraan suatu keluarga. Masyarakat DKI Jakarta, jika ditinjau dari luas lantai rumah yang dihuni, maka dapat dikatakan sejahtera. Pada tahun 1995, sebagian besar dari mereka yaitu 54 persen menghuni rumah dengan luas lantai rata-rata lebih dari 50 meter persegi.
11. Cukup menggembirakan tingkat kebersihan air yang diminum oleh penduduk DKI Jakarta karena telah terjadi kenaikan derajat kebersihan air minum selama kurun waktu 1993 -1995. Pada tahun 1993, sumber air yang banyak diminum adalah leiding (46,01 persen). Pada tahun 1995, sumber air minum dari leiding mencapai 46,54 persen. Keadaan ini mencerminkan keadaan masyarakat akan kebersihan air minum bertambah ditunjang pelayanan PDAM yang lebih merata.
12. Masyarakat DKI Jakarta cukup mengerti mengenai kesehatan lingkungan, sehingga sudah banyak dari mereka yang membuang air besarnya ke kakus sendiri dengan tangki septik (61,69 persen).
13. Peningkatan kesejahteraan akan diiringi dengan berubahnya pola konsumsi dari konsumsi makanan ke konsumsi non makanan. Persentase pengeluaran yang digunakan untuk konsumsi makanan menunjukkan penurunan, sedangkan pengeluaran untuk non makanan menunjukkan kenaikan. Semakin sejahtera suatu rumah tangga maka mereka akan mencoba untuk meningkatkan pemenuhan atas

kebutuhan lainnya di luar kebutuhan pangan. Sebagian besar kebutuhan kalori dan protein penduduk DKI Jakarta dipenuhi oleh padi-padian.

14. Selama kurun waktu 1992-1995, terjadi peningkatan persentase penduduk yang melakukan perjalanan wisata. hal tersebut memberikan indikasi bahwa perjalanan wisata lebih menjadi suatu kebutuhan bagi penduduk DKI Jakarta.
15. Akses penduduk terhadap media massa menunjukkan suatu pola yang berbeda untuk setiap jenis media massa selama kurun waktu 1992-1995. Persentase penduduk yang mendengarkan radio mengalami penurunan, sedangkan yang menonton televisi relatif tidak berubah. Dan persentase penduduk yang membaca surat kabar/majalah menunjukkan penurunan. Hal ini cukup memprihatinkan karena memberikan suatu indikasi bahwa terjadi penurunan minat baca dari penduduk.
16. Angka kejahatan di wilayah DKI Jakarta menunjukkan peningkatan, akan tetapi skala waktu peristiwa kriminal menunjukkan penurunan peristiwa kejahatan yang paling banyak dilaporkan adalah pencurian dengan pemberatan. Sedangkan persentase penduduk yang mengalami tindak kejahatanpun semakin meningkat.

9.2. SARAN

1. Untuk mengantisipasi penambahan penduduk, disamping program keluarga berencana perlu terus ditingkatkan juga ditekankan bahwa upaya penurunan urbanisasi di DKI Jakarta tidak akan pernah bisa dicapai tanpa dibarengi dengan upaya-upaya perluasan lapangan kerja di daerah-daerah lain agar para migran tidak selalu melirik Jakarta sebagai tempat mencari nafkah.
2. Untuk itu agar perencanaan perekonomian tingkat nasional lebih responsif lagi untuk penciptaan sentra perekonomian baru di daerah-daerah lain terutama di luar Jawa, sehingga pendatang dari luar DKI Jakarta yang bermaksud mengadu nasib ke DKI Jakarta diharapkan dapat berkurang.
3. Untuk memberikan kemudahan-kemudahan kepada masyarakat dalam memasukkan anaknya ke sekolah baik tingkat SD, SMTP, maupun SMTA harus

diperketat sistem rayonisasi, terutama untuk mencegah masuknya anak-anak sekolah lulusan dari wilayah Botabek ke Jakarta.

4. Di bidang kesehatan masih perlu ditingkatkan mutu dan pelayanan Puskesmas, karena sarana tersebut paling banyak dikunjungi oleh masyarakat golongan bawah
5. Tingkat pendapatan pekerja hendaknya selalu didasarkan pada kebutuhan hidup minimum (KHM).
6. Perjalanan wisata merupakan salah satu kebutuhan rokhani. Oleh karena itu, masyarakat DKI Jakarta perlu dimotifikasi untuk melakukan perjalanan wisata agar tingginya persaingan untuk bertahan hidup mereka tetap memiliki keseimbangan jiwa.
7. Tindak kejahatan di DKI Jakarta masih sangat tinggi, perlu kiranya peningkatan usaha dari aparat keamanan untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat DKI Jakarta.

<https://jakarta.bps.go.id>



KANTOR STATISTIK PROPINSI DKI JAKARTA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8 – 9
Telp. 3840084 JAKARTA

